

**ANALISIS PERAN OKI DALAM KASUS ISLAMOPHOBIA DI PRANCIS
PADA TAHUN 2015**



PROPOSAL SKRIPSI

Oleh:

Aliefianov Bayuaji Anandaru

16323012

**Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia**

Yogyakarta

2021

HALAMAN PENGESAHAN
ANALISIS PERAN OKI DALAM KASUS ISLAMOPHOBIA DI PRANCIS
PADA TAHUN 2015

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-syarat Guna Memperoleh

Mengesahkan
Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Ketua Program Studi



Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A.

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Dewan Penguji

1. Willi Ashadi S.H.I., M.A.
2. Hasbi Aswar S.IP., M.A.
3. Hadza Min Fadhli Robby, S.IP., M.Sc.

Tanda Tangan

DAFTAR ISI

Halaman pengesahan.....	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Singkatan	iv
Bab 1 Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Signifikansi Penelitian	7
1.5 Cakupan Penelitian	8
1.6 Tinjauan Pustaka	8
1.7 Landasan Teori	12
1.8 Metode Penelitian	
1.8.1 Jenis Penelitian	14
1.8.2 Alat Pengumpulan data	14
Bab 2 Asal-usul Islamophobia di Prancis	15
Bab 3 Analisis OKI Terhadap Kasus Islamophobia di Prancis pada Tahun 2015 Melalui Konsep Peran Organisasi Internasional Clive Archer	25
3.1 Kiprah OKI dalam Dunia Internasional	30
3.2 Kasus Besar Islamophobia di Prancis dan Kasus di Tahun 2015	36
3.3 Perbandingan Peran OKI dalam Menangani Isu Islamophobia di Negara Lain ..	40
3.4 Cara OKI dalam Menanggulangi Kasus Islamophobia di Eropa dan Prancis	44
3.5 Kerjasama OKI dengan PBB dan Uni Eropa	50
3.6 Peranan OKI dalam Menangani Isu Islamophobia di Prancis	53
Bab 4 Penutup	
4.1 Kesimpulan	57
4.2 Rekomendasi	59
Daftar Pustaka	60

DAFTAR SINGKATAN

1. AFVT : Association of French Victims Terror
2. OKI : Organisasi Kerjasama Islam
3. PBB : Persatuan Bangsa-Bangsa
4. EU : European Union atau Uni Eropa
5. HAM : Hak Asasi Manusia
6. IPTEK : Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
7. KTT : Konferensi Tingkat Tinggi
8. IGO : Inter-Governmental Organization
9. NGO : Non-Governmental Organization
10. PLO : Palestine Liberation Operation
11. IPHRC : Independent Permanent Human Rights Commission
12. EUMC : European Monitoring Centre
13. WTC : World Trade Center
14. SARA : Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan
15. UMP : Union Pour un Mouvement Populaire
16. CNCDH : *Commission Nationale Consultative des Droits de L'Homme*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Prancis merupakan salah satu dari berbagai negara maju di benua biru atau daratan Eropa. Buktinya Prancis telah mampu menciptakan berbagai jenis teknologi. Wilayah Metropolitan di Prancis terbagi menjadi 13 daerah yang mana setara dengan beberapa tingkatan di daerah 1 dan 101 departemen yang setara dengan daerah tingkatan 2. Berdasarkan fakta kependudukan di Prancis, bahwasannya penduduk di negara tersebut pada tahun 2011 melampaui 65 juta jiwa, yang mana hal tersebut membuat negara Prancis menjadi salah satu negara di Eropa yang memiliki lonjakan kependudukannya berkembang pesat (Économiques, 2011). Kota-kota di Prancis yang memiliki jumlah penduduk terbanyak meliputi :

Paris	2.233.818	Jiwa
Marseille	851.420	Jiwa
Lyon	474.946	Jiwa
Toulouse	439.550	Jiwa
Nice	344.875	Jiwa
Nantes	283.288	Jiwa
Strasbourg	272.975	Jiwa
Bordeaux	235.891	jiwa

Lille	225.780 jiwa
-------	--------------

Source: The National Statistics Bureau of France

Kota-kota tersebut lah yang memiliki data persebaran penduduk terbanyak di Prancis (Jakarta, 2016).

Persebaran agama Islam di Eropa khususnya di Prancis terbilang sangat cepat, mengingat persebaran agama Islam di Prancis disebabkan oleh para imigran yang berasal dari benua Afrika khususnya dari Afrika Utara. Kehadiran agama Islam di Prancis memang telah dimulai sejak lama. Islam di Prancis telah berkembang dengan pesat sejak gelombang pertama imigran Muslim datang. Kehadiran gelombang pertama tersebut bertepatan dengan perubahan kondisi hidup di Prancis. Para imigran Muslim tersebut datang dengan jumlah yang besar. Mereka berasal dari Afrika Utara dan beberapa dari negara di Timur Tengah. Contohnya saja seperti Aljazair, Tunisia, Moroko, dan beberapa negara di Timur Tengah. Para imigran Muslim Prancis ini memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah pemukiman yang terbilang relative berdekatan di daerah terpencil dari ibukota Prancis, Paris dan pinggiran kota Saint-Denis, Aubervilliers, serta Gennevilliers. Di dalam data administratif Prancis, wilayah kota Paris terbagi menjadi berbagai wilayah, seperti Ile-de-France, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise Essonne, Yvelines, dan Seine-et-Marne. Daerah-daerah di Paris tersebutlah yang merupakan wilayah tertinggi dengan penduduk yang beragama Muslim di Prancis. Menurut sensus penduduk Prancis di tahun 1999, terdapat kurang lebih 1,6 juta jiwa imigran di wilayah Ile-de-

France. Setelah Perang Dunia 1 telah usai, Prancis membangun beberapa masjid besar atas perintah dari Edouard Herriot karena atas ikut andilnya kaum Muslim membela Prancis. Contohnya adalah Masjid Paris, Masjid Adda'wa, dan Masjid Ar-Rahma (Sasongko, 2016).

Islam merupakan agama yang damai, rahmat bagi pemeluknya, dan bersifat universal tetapi tidak berjalan mulus dengan apa yang di ciri-cirikan. Mengingat di Eropa tekanan masyarakatnya terhadap kaum Muslim sangatlah tinggi walaupun masih ada beberapa penduduk yang mau menerima keberadaan Islam itu sendiri. Para imigran Muslim tersebut datang dari berbagai negara Muslim khususnya dari Jazirah Arab dan Afrika. Saat ini menurut survey dari Insee, yaitu suatu lembaga statistik nasional Prancis, telah menyatakan bahwasannya masyarakat Muslim Prancis sudah menyentuh angka 7 juta jiwa. Maka dengan jumlah tersebut membuat Prancis menjadi negara dengan jumlah penduduk Muslim terbanyak dan terbesar di Eropa. Dengan adanya kedatangan para imigran Muslim tersebut di Prancis, membuat perkembangan Islam di Prancis semakin cepat. Perkembangan tersebut dapat dibuktikan dengan adanya mereka (para imigran) mendirikan sebuah organisasi untuk mengembangkan dan menguatkan jaringan agama Islam. Karena pengaruh agama Islam yang kuat di Prancis, maka pemerintah Prancis melarang para buruh dari imigran yang datang untuk melakukan tindakan penyebaran agama Islam di tanah mereka. Adanya larangan tersebut karena pemerintah Prancis sangat khawatir, jikalau organisasi Islam yang para imigran dirikan ini semakin kuat serta dapat membuat

kelompok etnis garis keras, menimbulkan disintegrasi, dan dapat memecah belah kelompok masyarakat lokal. Dengan adanya ini pula bisa jadi pintu untuk para imigran lain akan dipersempit bahkan ditutup terutama untuk imigran yang beragama Islam dan pastinya agama Islam di Prancis akan dipersulit hidupnya dengan berbagai keterbatasan (Republika, 2019).

Isu Islamophobia sudah menjadi permasalahan yang penting bagi dunia internasional, karena masyarakat dunia yang beragama Muslim dianggap sebagai agama teroris, agama yang selalu melayangkan serangan bagi kadamaian dunia. Contohnya saja yang mengatakan demikian adalah seorang Ketua Asosiasi Korban Teror Prancis (AFVT), Guillaume Denoix de Saint-Marc, dia mengatakan bahwasannya 80% pelaku terorisme adalah Muslim (Agustina, 2019). Anggapan tersebut datang dari orang-orang yang memiliki rasa takut, karena para teroris yang mayoritas melakukan serangan adalah seseorang yang beragama Muslim. Bisa diambil contoh di negara-negara Barat banyak sekali negara yang warganya bahkan pemerintahnya memberikan *stereotype* buruk kepada warganya yang beragama Muslim. Tidak hanya memberikan *stereotype* buruk, namun beberapa pemerintah di daratan Eropa juga memberlakukan peraturan dimana warga Muslim perempuan dilarang menggunakan hijab dan masyarakat Muslim yang lain juga dibatasi untuk menjalankan ibadah di masjid. Contoh saja di salah satu negara Barat seperti Prancis, karena negara maju tersebut pada tahun 2011 telah melarang warga perempuannya untuk memakai hijab yang hanya menyisakan wajah atau mata di tempat umum.

Aturan tersebut diperlakukan secara merata baik warga negaranya yang Muslim maupun warga negara asing yang berkunjung ke Prancis. Jika ada individu yang melanggar akan dikenakan denda sebesar 150 Euro atau sekitar Rp. 2,4 juta. Untuk individu atau kelompok yang memaksa individu lain mengenakan hijab atau niqab akan dikenakan denda yang lebih besar, yaitu 300.000 Euro atau sekitar Rp. 480 juta. Pada tahun 2015 sudah terdapat 1.546 orang yang terkena hukuman denda (VOA, 5 Negara yang Melarang Hijab atau Niqab: Prancis Hingga Turki, 2019). Para anggota senat telah membuat UU atau undang-undang mengenai larangan setiap wanita Muslim Prancis mengenakan hijab di tempat umum termasuk para pelajar Muslim Prancis yang akan pergi bersekolah (Andrian, 2019).

Berbicara persebaran agama Islam di Prancis sangatlah besar. Karena hal itulah di Prancis timbul kasus Islamophobia yang sudah merajalela. Isu Islamophobia di Prancis juga bisa dikatakan mengkhawatirkan mengingat berdasarkan data sepanjang tahun 2019 lalu telah naik mencapai 54%. Menurut Presiden Lembaga Pengawas Nasional Islamophobia Prancis, Abdallah Zekri, mengatakan bahwasannya pada tahun 2018 telah naik menjadi 100 kasus serangan terhadap kaum Muslim di Prancis dan 1 tahun berselang, tepatnya pada 2019 serangan Islamophobia telah melonjak tinggi mencapai 154 kasus serangan di 3 kota Prancis yaitu Ille-de-France, Rhones-Alpes, dan Paca.

Islam di Prancis menjadi agama terbesar kedua termasuk di wilayah Eropa Barat. Oleh sebab itulah, Prancis harus menerima konsekuensi dimana masyarakat

Eropa sangat sentimen terhadap Islam dan menerima kuatnya persebaran Islam di Prancis. Memang sebelumnya, tepatnya pada bula November 2019, ribuan warga Prancis memadati ibukota Prancis yaitu Paris untuk menyerukan atau memprotes Islamophobia yang dinilai telah memecah belah sistem perpolitikan Prancis. Berbagai Partai dari sayap kiri di Prancis juga mengambil peran di demo tersebut. Menurut ketua partai sayap kanan di Prancis, Marine Le Pen mengatakan bahwasannya demo tersebut telah dikoordinir oleh orang-orang yang bisa dikatakan dari garis keras di Prancis. Lalu, memang pada awal November 2019 sebelum terjadinya demo tersebut, banyak warga Muslim Prancis yang kurang lebih 40% mengaku telah diperlakukan tidak enak seperti didiskriminasi sosial karena soal agama (Tempo, 2020).

Isu Islamophobia memang harus membutuhkan perhatian khusus dan solusi yang tepat guna meminimalisir atau bahkan menghilangkan kasus *Islamophobia* tersebut. *Islamophobia* sendiri sebenarnya telah membuat kaum Muslim di Prancis bahkan dunia takut dan sakit hati. Kaum Muslim di Prancis tidak mendapatkan HAM seperti lainnya dan tidak mendapatkan kebebasan dalam beragama. Untuk memberikan solusi dan membantu kaum Muslim Prancis, maka OKI mengambil peran untuk mengatasi kasus Islamophobia yang terjadi di Prancis. Peran tersebut yaitu deklarasi menangani terorisme dengan cara memerangnya, OKI meminta bantuan juga terhadap PBB serta Uni Eropa, dan mengadakan *interfaith dialogue* (Cooperation, n.d.).

1.2. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti sebuah rumusan masalah yang terkait dengan permasalahan Islamophobia di Prancis, yaitu “Bagaimana peran Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dalam menangani kasus Islamophobia di negara Prancis pada tahun 2015?”

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui kasus-kasus yang disebabkan oleh Islamophobia di daratan Eropa dengan studi kasus negara Prancis dan bagaimana peranan yang dilakukan oleh OKI serta kerjasamanya dengan PBB dan Uni Eropa demi mengurangi isu Islamophobia yang melanda negara Prancis.

1.4. Signifikansi Penelitian

Prancis merupakan salah satu negara maju di daratan Eropa termasuk di Eropa Barat. Dimana Prancis bisa dikatakan kuat dalam berbagai sektor dan maju di teknologi. Namun, di internal negaranya terdapat berbagai masalah dan salah satunya adalah kasus *Islamophobia* yang semakin hari semakin memanas karena terjadinya diskriminasi sosial, rasis, dan lain-lain hal. Penelitian ini diambil untuk mengulik mengenai kasus-kasus yang disebabkan oleh Islamophobia di Prancis dan peranan OKI yang bekerjasama dengan PBB serta Uni Eropa dalam mengurangi kasus serangan Islamophobia tersebut.

1.5. Cakupan Penelitian

Berdasarkan penjabaran sebelumnya yang penulis sampaikan, memang benar bahwasannya penelitian ini diambil agar penulis dapat mengetahui bagaimana terjadinya kasus-kasus serangan Islamophobia yang dilakukan oleh masyarakat Prancis serta pemerintah Prancis yang memiliki sentimen tinggi dan penelitian ini ada guna meneliti bagaimana peranan OKI yang bekerjasama dengan PBB serta Uni Eropa dalam menangani masalah ini. Penanganan itulah yang diharapkan mampu mengurangi kasus-kasus serangan Islamophobia di Prancis.

1.6. Tinjauan Pustaka

Penulis memberikan beberapa daftar studi pustaka sebagai pertimbangan dan rujukan untuk mengerjakan penelitian ini yang mana telah sesuai dengan judul penelitian yang penulis teliti. Studi pustaka yang pertama dirujuk dari skripsi atas nama Yuana Khamsiani dengan judul Upaya serta Peran Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dalam menangani Isu *Islamophobia* di Prancis Pasca Peristiwa Besar Terorisme 13 November. Pada skripsi yang ditulis oleh Yuana Khamsiani tersebut menjelaskan bahwa, Islam datang ke Eropa untuk bermigrasi dan juga mencari suaka yang memang akan mensejahterakan mereka. Para imigran di Eropa telah berkembang dengan pesat serta mendirikan suatu organisasi yang berfungsi untuk memperkuat jaringan Islam di Eropa. Para imigran yang bermigrasi ke Eropa mayoritas berasal dari Afrika Utara dan Timur Tengah.

Pada dasarnya awal-awal para imigran datang ke negara-negara Eropa yang bertujuan mencari kesejahteraan atau suka disambut baik oleh masing-masing pemerintah Eropa yang mereka datangi. Namun pada kenyataannya seiring berjalannya waktu mereka diperlakukan diskriminasi serta di kecam oleh berbagai pihak karena para imigran tersebut menunjukkan karakter berdasarkan kepercayaan yang mereka anut. Masing-masing dari para Imigran yang menunjukkan karakter dan idealismenya dengan terang-terangan membangun suatu organisasi demi menguatkan jaringan agama Islam di Eropa dan menyebarkan ajaran-ajaran Islam. Oleh karena hal tersebut, pemerintah dari negara-negara Eropa termasuk Prancis mengecam dan juga melarang bagi para imigran Muslim untuk menggunakan atribut yang menggambarkan kepercayaan mereka. Terlebih pada kejadian 13 November 2015 dimana terjadi serangan terorisme seperti bom bunuh diri, penembakan massal, dan penyanderaan menjadi puncak dari kekesalan pemerintah Prancis serta menimbulkan aliran Anti-Islam (Khamsiani, 2018).

Penulis memilih menggunakan rujukan dari skripsi milik Yuana Khamsiani karena skripsi penulis dengan skripsi milik Yuana Khamsiani memiliki beberapa kesamaan, namun dengan objek tragedi dan tahun yang berbeda. Memang berdasarkan seperti penulis katakan bahwasannya data-data yang menjadi rujukan di penelitian ini memiliki kesamaan dan tata letak yang mirip dimana terdapat aksi serangan terorisme di sepanjang tahun 2015. Poin-poin yang menjadi kesamaan antara penelitian penulis dan penelitian Yuana Khamsiani hanya pada objeknya saja, yaitu negara Prancis yang mengalami sederet aksi terorisme.

Isu-isu seputar Islamophobia memang merupakan gejala atau kasus yang sedang hangat-hangatnya setelah tragedi tanggal 11 September 2001 di Amerika Serikat dan ditambah lagi ketika terjadi penyerangan hebat di kantor pusat majalah satir Charlie Hebdo di Paris, Prancis pada tanggal 7 Januari 2015. Pasca kejadian tersebut langsung menjadi sorotan publik dari berbagai kalangan di dunia internasional. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya sumber yang membahasnya. Beberapa partai politik di Prancis seperti salah satunya French National Front Party atau National Rally, telah menjadikan isu imigran Muslim dan budaya Muslim sebagai “dagangan” politik mereka (Castle, 2008). Sentimen anti Islam yang terjadi di Prancis telah menjadi “makanan sehari-hari” politik serta asset yang berharga dalam mencari dukungan dari masyarakat local maupun daratan Eropa. Masyarakat Eropa tak terkecuali Prancis banyak yang mempercayai dan menilai bahwasannya agama Islam merupakan agama yang erat kaitannya dengan teror dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya (Nielson, 2002). Dengan sentimen-sentimen buruk yang dilontarkan oleh masyarakat Prancis selain penilaian buruk tersebut. Maka pada tahun 2015 lonjakannya meningkat dan lebih dari 61% bahwasannya agama Islam tidak sesuai dengan masyarakat serta kehidupan di Prancis (Hasson, 2016). Kasus tersebut juga dapat mewakili penilaian buruk warga Prancis yang berujung pada meningkatnya 77% warga Prancis ingin burkini dilarang dan 79% penolakan terhadap warga Muslim untuk mengenakan hijab di tempat umum (Marniati, 2017).

Pandangan dari teori Peran Organisasi Internasional yang dikemukakan oleh Clive Archer terbilang sangat cocok untuk membantu menyelesaikan masalah yang

terjadi di Prancis, yaitu kasus-kasus serangan diskriminasi terhadap umat Muslim sehingga munculnya Islamophobia atau *stereotype* dari pemerintah Prancis dan masyarakat Prancis terhadap citra Islam. Dalam sejarah kehidupan hubungan internasional, memang adanya konflik telah menjadi bagian atau pilihan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di dunia. Pemilihan konflik ini sebagai solusi yang “tepat” tergantung bagaimana suatu bangsa menyikapi dan menangani konflik tersebut. Adanya konflik ini juga dapat dijadikan sebagai pembelajaran hidup yang berharga dan pembelajaran sejarah yang akan datang. Adanya konflik juga merupakan suatu hal yang baik, namun terkadang hal tersebut menjadi rumit karena proses penyelesaiannya tidak berjalan sesuai yang diharapkan.

Oleh sebab itulah, sesuai yang penulis sampaikan bahwasannya paham atau teori dari peran organisasi internasional sangat cocok untuk masalah Islamophobia di Prancis. Peran organisasi internasional bisa dikatakan cocok karena peran organisasi internasional menggunakan pendekatan yang tepat seperti dengan cara menempatkan organisasi tersebut menjadi *instrument*, forum mediasi, dan aktor dalam menyelesaikan suatu masalah yang terjadi. Pendekatan teori peran organisasi internasional ini menggunakan yang namanya pihak ketiga guna membantu memecahkan masalah yang ada, dimana pihak ketiga ini adalah organisasi internasional OKI. Pemilihan paham peran organisasi internasional ini karena terbilang lebih netral sehingga penyelesaian masalahnya akan jauh lebih efektif. Untuk penyelesaian masalah Islamophobia di Prancis sangat cocok

diimplementasikan dengan konsep ini karena jauh dari yang namanya kekerasan (Lifepal, 2019).

1.7. LANDASAN TEORI PERAN ORGANISASI INTERNASIONAL

Teori peran organisasi internasional dalam ilmu hubungan internasional merupakan suatu proses penyelidikan untuk menyelesaikan sebuah masalah atau konflik yang ada dengan mempertimbangkan beberapa aspek yang terdapat di nilai-nilai kehidupan dari setiap individu atau kelompok yang ada seperti adanya identitas dan juga pengakuan-pengakuan dari muka umum. Hal-hal tersebut sangat diperlukan guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari setiap individu dan kelompok tersebut. Teori ini mencoba menunjukkan bahwa setiap konflik yang terjadi di dalam dunia ini dapat diselesaikan dengan baik-baik tanpa adanya konflik yang berkelanjutan, yang sampai merugikan banyak pihak. Konflik yang terjadi memang didasari dari berbagai hal, seperti konflik dari masing-masing internal yang ada, eksternal dari masing-masing individu atau kelompok bahkan dari antar suatu negara yang berdaulat sekalipun. Konflik juga bisa diakibatkan oleh adanya perdagangan, kasus-kasus diskriminasi, sengketa, pengakuan perbatasan suatu wilayah, dan lain-lain hal. Tentunya dari semua jenis masalah yang mengakibatkan pertikaian atau konflik, pasti masing-masing pihak menginginkan sebuah perdamaian agar konflik tersebut dapat terselesaikan dengan cara yang baik. Semua jenis konflik yang terjadi juga bisa diselesaikan dengan berbagai hal, mulai dari adanya pertolongan pihak kedua atau

ketiga, seperti adanya pertolongan dari organisasi-organisasi internasional bahkan bisa diselesaikan langsung oleh pihak-pihak yang sedang berkonflik tersebut.

Menurut ahli teori peran organisasi internasional dalam ilmu hubungan internasional seperti Clive Archer, menyatakan bahwasannya terdapat 3 hal dasar yang utama dalam teori peran organisasi internasional, yaitu sebagai instrumen, forum diskusi konflik, dan aktor (Archer, 2003). Teori peran organisasi internasional ini sendiri juga terdapat pendekatan yang demokratis. Beberapa kasus jika terjadi sebuah konflik sebelum adanya perdamaian pasti akan diselesaikan dengan cara kekerasan. Namun ternyata, kekerasan tersebut sangatlah merugikan kedua belah pihak yang sedang berseteru. Sebenarnya dalam memecahkan sebuah masalah atau konflik, peran organisasi internasional inilah bisa menjadi solusi alternatif yang dapat membantu pihak-pihak yang sedang berkonflik untuk berdamai, walaupun dengan tahapan-tahapan proses yang Panjang dan tepat. Bahkan pandangan ini sangat bermanfaat untuk mengembangkan hubungan yang sebelumnya sempat renggang mejadi erat kembali. Sama halnya dengan kasus Islamophobia di Prancis, dengan adanya diskriminasi sosial, keyakinan dan rasis.

Metode Penelitian

1.8.1. Jenis Penelitian

Dalam tugas akhir skripsi ini akan membahas tentang jenis penelitian kualitatif dengan adanya pendekatan deskriptif. Dimana metode tersebut dilakukan dengan studi kasus dan menggunakan satu teori yang bertujuan untuk menganalisis dan menjawab setiap pertanyaan dari penelitian ini. Penelitian ini akan menghasilkan tulisan berupa data-data valid yang terkumpul di dalam satu rangkaian.

Penulis menggunakan jenis penelitian ini guna dapat mengetahui bagaimana OKI yang bekerjasama dengan PBB dan Uni Eropa dalam menangani kasus-kasus Islamophobia di Prancis.

1.8.2. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan adalah *e-book*, jurnal ilmiah, dokumen resmi dari institusi, buku, dan artikel di internet yang tentunya bertujuan untuk mengumpulkan data-data yang akurat, sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan semestinya dan tentunya dibantu oleh beberapa sumber terpercaya tersebut. Buku-buku tersebut yang dikumpulkan di perpustakaan pusat di Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia. Kajian yang dikumpulkan berasal dari data sekunder yang di ambil dari dokumen resmi dan yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB II

ASAL USUL ISLAMOPHOBIA DI PRANCIS

Pada bab 2 ini, penulis akan lebih membahas dan menjelaskan terkait dengan asal usul kedatangan isu *Islamophobia* yang sedang terjadi di Prancis dalam beberapa dekade belakangan ini, yang sangat meresahkan Muslim dunia, kontroversial, dan menjadi sorotan dunia internasional. Dimana isu *Islamophobia* yang sedang terjadi di Prancis memiliki persentase yang cukup besar, yang mana juga kasus ini membawa dampak bagi citra Muslim sendiri dari perlakuan tidak manusiawi pemerintah Prancis dan juga masyarakat aslinya. Adanya kasus *Islamophobia* di Prancis inilah, pastinya akan membawa dampak buruk bagi mental korbannya yang disini merupakan umat Muslim di Eropa, khususnya di Prancis. Dari kasus yang terjadi di Prancis ini, dapat memberikan ketegasan kepada Bangsa Barat, khususnya Prancis sangat tidak menghormati sesama manusia sebagai makhluk beragama (OIC, oic-oci.org, 2015).

Penilaian buruk dan sentimen tinggi terhadap Muslim di Eropa telah terjadi sejak lama. Penilaian buruk dan juga sifat benci masyarakat asli Eropa semakin tinggi dan meningkat. Isu *Islamophobia* yang terjadi di Eropa, termasuk di Prancis merupakan bentuk rasa takut, marah dan rasa mencekam dari diri masing-masing warga asli Eropa dan Prancis. Kejadian-kejadian atas isu *Islamophobia* di Eropa, khususnya di Prancis dimulai dari serangan teror di Amerika Serikat yang menyerang Gedung kembar WTC pada tahun 2001 dan

ditambah juga kantor majalah satir Charlie Hebdo, di tengah-tengah kota Paris pada tahun 2015. Sebelum terjadi segala serangan teror yang terjadi di Eropa, khususnya di Prancis ataupun dunia, hubungan antara golongan kulit putih di Eropa dan juga warga imigran Muslim yang datang ke Eropa berjalan dengan baik, namun dengan adanya serangan teror yang mencekam dan membuat sejarah kelam bagi warga Eropa, membuat hubungan tersebut hancur. Hubungan tersebut hancur diakibatkan karena kepercayaan warga asli Eropa hilang karena perubahan karakter, tingkah laku, dan pola pikir para imigran Muslim di Eropa. Dari kejadian tersebut, pemerintah Eropa, Prancis dan warga asli Eropa, maupun Prancis meminta dengan tegas agar bertanggung jawab penuh atas apa yang telah mereka lakukan di Eropa.

Muslim di Prancis mendapatkan banyak tekanan yang sangat menyulitkan kehidupan Islami mereka di tanah Eropa, termasuk di Prancis. Muslim di Prancis mendapatkan tekanan dan diskriminasi pemerintah Prancis dan juga dari masyarakat aslinya. Kedatangan imigran Muslim di Prancis bermula dari para imigran Muslim dari tanah Afrika Utara dan juga beberapa dari negara-negara Timur Tengah yang memang mencari suka atau sekedar demi mendapatkan kesejahteraan hidup yang lebih baik daripada sebelumnya. Adanya imigran Muslim yang datang ke tanah Eropa, termasuk Prancis dengan mudah, sebelum memang ditutupnya pintu imigran. Sebelum pintu imigran Prancis ditutup, para imigran Muslim di Prancis berkembang semakin pesat dengan adanya mereka mendirikan sebuah organisasi demi menguatkan jaringan

hubungan mereka di Prancis bahkan Eropa. Pada akhirnya pemerintah Prancis membuat suatu larangan yang melarang segala bentuk atribut yang berbau Islami digunakan di Prancis. Jika ada yang masih melanggar pastinya akan dikenakan denda yang cukup besar, karena pemerintah Prancis sangat takut dan khawatir. Jika organisasi yang didirikan imigran Muslim Prancis tersebut semakin kuat, maka akan membuat suatu golongan radikal, menimbulkan suatu disintegrasi, dan bahkan dapat memecah belah masyarakat golongan kulit putih asli Prancis. Setelah berbagai serangan teror yang terjadi di Eropa, khususnya Prancis. Para masyarakat golongan kulit putih asli mendesak imigran Muslim untuk keluar dari tanah Prancis.

Setelah teror yang menyerang kantor pusat majalah satir *Cahrlie Hebdo* di tengah-tengah kota Paris, muncul suatu pergerakan dari Partai Sayap Kanan atau Front Nasionalis Prancis, dan dipimpin langsung oleh ketua partai tersebut yang bernama Marine Le Pen semakin kuat. Menurut ketua Partai Sayap Kanan atau Front Nasionalis Prancis pada saat itu, Marine Le Pen, mengatakan bahwasannya isu *Islamophobia* ini demi merebut kembali pengaruh-pengaruh sistem perpolitikan Prancis. Marine Le Pen sebagai pemimpin Partai Sayap Kanan atau Front Nasionalis pada saat itu melayangkan kalimat provokatif yang ditujukan kepada para imigran Muslim sebagai kaum minoritas disana, namun membuat suatu kegaduhan di tanah Eropa dan Prancis. Dengan kalimat provokatif tersebut, Marine Le Pen pada saat itu menimbulkan perpecahan terhadap komunitas Muslim Prancis. Marine Le Pen juga menggunakan suatu konsep yang

dinamakan “*Laicite*” berguna untuk menyudutkan atau mendiskriminasi masyarakat imigran Muslim di Prancis. Dengan berkembang pesatnya imigran Muslim di Prancis, dengan adanya organisasi Muslim Prancis semakin kuat, dan kehadiran imigran Muslim ke Eropa bahkan Prancis akan mengancam nilai-nilai utama peradaban Kristen yang telah berkembang serta ada lama di tanah Benua Biru atau Eropa, termasuk Prancis.

Menurut sejarawan Prancis, bahwasannya arti dari rasa takut terhadap Muslim disini bukan hanya dapat memengaruhi bahkan mengambil system perpolitikan yang sudah ada, tetapi rasa takut ini dapat memengaruhi sistem pola pikir, gerakan dengan jumlah yang cukup tinggi, dan berbagai jenis media massa (Amrad, 2021). Isu *Islamophobia* yang terjadi di Eropa, termasuk di Prancis menjadi suatu senjata mematikan dan strategis atau “makanan sehari-hari” yang digunakan oleh para anggota Partai Sayap Kanan atau Front Nasionalis membuat suatu propaganda besar. Dengan adanya serangan ancaman dan hal-hal yang berbau diskriminasi agama, yang disini adalah kaum Muslim yang diserang, tentunya membuat kehidupan kaum Muslim di Prancis tidak tenang ataupun damai.

Faktor utama lainnya yang memang menjadi latar belakang terjadinya isu *Islamophobia* di Eropa, khususnya di Prancis selain kasus teror Gedung kembar WTC di Amerika Serikat dan kantor pusat majalah satir Prancis, adalah adanya pemahaman orientalisme bangsa Barat yang memang telah muncul sejak abad ke-18 lalu (Project, 2010). Untuk lebih jelasnya adalah

bangsa Barat berlomba-lomba untuk mengumpulkan sebuah koloni. Kolonialisme yang dilakukan oleh bangsa Barat yang dimaksud adalah kolonialisme ke bangsa Timur. Untuk dalam hal ini termasuk agama Islam, karena bangsa Barat beranggapan bahwasannya Islam berasal dari bangsa Timur. Dengan adanya kasus ini lah membuat bangsa Barat menganggap “dirinya” memiliki kekuasaan penuh di dunia atau *superior*. Bangsa Barat memiliki keyakinan dapat berkuasa penuh di wilayah Timur karena di wilayah Timur yang notabene menjadi wilayah lahirnya Islam dianggap sebagai wilayah yang masih primitif. Selain dianggap primitif, bangsa Barat juga menilai bangsa Timur sebagai wilayah yang tidak ada akal sama sekali, *uncivilized* barbar, penilaian buruk di segala hal, dan diberikan nilai-nilai secara sepihak sebagai negara-negara yang “inferior” jika dibandingkan dengan bangsa Barat. Penilaian-penilaian buruk tersebut berdampak jelas dengan adanya kalimat-kalimat rasis dan diskriminasi keyakinan dari bangsa Barat (Mede, 1997).

Jika bersumber dari yang tertulis di publikasi *The Runnymede Trust*, sebuah institusi NGO di Inggris pada tahun 1997 yang mengatakan bahwasannya nilai-nilai yang tertuang di budaya bangsa Timur dinyatakan tidak memiliki sama sekali pengaruh pada budaya-budaya yang berasal dari bangsa Barat. Superioritas yang ditanamkan sejak dahulu kala oleh bangsa Barat menyebabkan mental dari setiap masyarakatnya sangat sulit untuk menerima sebuah perbedaan yang ada dari yang ada di seluruh dunia. Dengan

terjadinya hal-hal seperti itu menyebabkan munculnya sisi rasis SARA dan dengan tegas menolak adanya integrasi dari yang bukan berasal dari dunia Barat. Hal tersebutlah selain munculnya isu *Islamophobia* di Eropa juga muncul dengan istilah *Xenophobia* yang berarti ketakutan yang sangat besar dari budaya luar dan ketakutan akan pendatang baru atau imigran, sehingga menimbulkan sifat anti terhadap orang-orang non-Barat.

Seperti yang telah dijelaskan di penjelasan sebelumnya, bahwasannya memang pemerintah Prancis melarang masyarakatnya yang beragama Muslim untuk menggunakan segala atribut yang berbau agama Islam di Prancis, bahkan dibuatkan sebuah UU dan penegakkan denda yang cukup besar. UU sebelumnya yang masih berbentuk rancangan dinamakan *Assemble Nationale*, yang dirancang pada tanggal 11 April 2011. RUU *Islamophobia* ini dicetuskan oleh Jean-Francois Cope, yang memang selaku presiden UMP (*Union Pour un Mouvement Populaire*) yang bersamaan dibuatnya "*La Loi Contre La Burqa*". Lalu dengan adanya RUU ini disahkan langsung oleh presiden Prancis pada saat itu yang menjabat ialah Nicolas Sarkozy pada tanggal 21 April 2011. Dengan adanya pengesahan UU tersebut dan pelarangan yang ketat bagi Muslimin Prancis terhadap hal-hal yang berbau dengan Islam, pastinya muncul kesenjangan sosial yang memiliki "*gap*" yang besar antara penduduk asli Eropa (ras kulit putih) dengan imigran Muslim yang datang, walaupun datang dengan damai.

Masalah kesenjangan sosial yang menyebabkan perbandingan yang sangat jauh mirisnya dari kesejahteraan imigran yang rendah dengan penduduk asli yang golongan kulit putih mendapatkan kesejahteraan yang mutlak. Dari adanya kesenjangan tersebut, muncul penilaian yang buruk lalu harus dipertanyakan kembali status penegakkan integrasi multikulturalisme di tanah Eropa sebagai wilayah bangsa Barat. Menurut laporan tahunan di Prancis dari CNCDH (*Commission Nationale Consultative des Droits de L'Homme*) yang dikeluarkan di tahun 2015 menyatakan bahwasannya kasus diskriminasi di Prancis meningkat drastis dalam jangka waktu 5 tahun terakhir. Dalam survei yang dilakukan oleh CNCDH tersebut lebih menekankan kasus praktik agama Islam, segala bentuk ibadah agama Islam, dan makanan-makanan yang harus bersertifikat halal, yang memang dianggap sebagai penghalang kehidupan bersama-sama. Hal tersebut membuktikan adanya radikalisme yang parah terhadap kasus diskriminasi dan *Islamophobia*.

Fenomena dari isu *Islamophobia* yang terjadi di Eropa, khususnya di Prancis berbentuk segala jenis tindakan. CCIF melakukan survei juga, bahwasannya tindakan *Islamophobia* berbentuk diskriminasi, kekerasan segala jenis dari fisik maupun verbal, ucapan kebencian, dan penistaan agama yang pelakunya tidak ditindak lanjuti segala hukum. Untuk kekerasan fisik maupun verbal meningkat drastis hingga 150% dan juga terdapat beberapa laporan yang naik secara signifikan. Untuk kasus diskriminasi naik drastis

juga hingga 140% dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jenis-jenis kasus seperti hal tersebut mencapai tingkatan yang krusial, yang mana kaum Muslim di Eropa, termasuk di Prancis kehadirannya jelas ditolak, ditargetkan, dan bahkan diserang secara bertubi-tubi dalam kehidupan sehari-hari.

Peristiwa-peristiwa isu *Islamophobia* yang terjadi di Prancis menimbulkan penilaian dan pemahaman yang sudah jelas salah antara terorisme dan Islam. Sudah jelas terorisme merupakan oknumnya saja, sedangkan Islam adalah agama yang membawa kedamaian. Kekeliruan tersebut tidak hanya dilakukan oleh warga aslinya saja yang menargetkan kepada pihak-pihak Muslim Prancis, melainkan juga dilakukan oleh pejabat-pejabat politik Prancis yang didukung oleh para jurnalis media massa serta elektronik, dan segala jenis elemen masyarakat di Prancis. Semua aspek tersebut menjadi dalang terjadinya radikalisme *Islamophobia*, terlebih para pejabat yang menggunakan isu ini sebagai “makanan sehari-hari” demi melancarkan segala kampanye politik. Pihak-pihak tersebut yang menilai agama Islam dan Muslim sebagai teroris yang seharusnya dijauhi dan dilawan oleh bangsa dunia. Kasus ini juga disebabkan dari beberapa hal, yaitu meliputi kesenjangan akses pendidikan, tingkat kemiskinan yang disebabkan dengan banyaknya tingkat pengangguran, diskriminasi sosial, dan lain-lain sebagainya (Fuga, 2010).

Hal ini mengingat bahwasannya menjadi identitas kulturalisme yang kolektif. Identitas ini yang berdasarkan pada sejarah yang sudah ada dan yang sudah tercatat lama dalam sejarah Eropa. Hal ini dapat membagi beberapa hal, yang pertama identitas sosial dan konsep tingkah laku. Identitas sosial ini yang terdapat di segala bentuk, terutama aktor negara sebagai sosok yang seharusnya memiliki solidaritas sosial antar individu yang menempati di negara tersebut dan seharusnya dapat menjadi solusi yang tepat dalam menangani diskriminasi sosial beragama dan isu *Islamophobia*. Adanya perbedaan yang sangat jelas berdasarkan sejarah kelam yang diteruskan hingga sekarang oleh bangsa Barat sudah jelas sangat salah. Bahwasannya negara Eropa menutup segala jenis yang berbau dari dunia luar terlebih dunia Timur dan Islam. Perbedaan identitas atau rasial yang dilakukan oleh bangsa Barat baik dari masalah keyakinan, paham nasionalisme, dan bahkan *gender* jelas mengarah terhadap identitas aktor tertentu.

Pentingnya solidaritas sosial yang harus diterapkan oleh sebuah aktor, yang disini dimaksudkan adalah negara untuk memiliki nilai-nilai sosial yang tinggi demi melepaskan krisis identitas sosial, terlebih bagi Prancis yang sangat sentimen dengan Muslim. Dengan kasus ini yang menyebabkan isu *Islamophobia* muncul dan meningkat di Prancis adalah masalah rasa takut terhadap para pendatang dan imigran. Identitas multikulturalisme Prancis yang lebih memfokuskan pada rasa saling memiliki bagi masyarakat aslinya

yang berkulit putih dan yang telah menjunjung tinggi nilai-nilai Kristen atau Nasrani yang sudah lama ada di Prancis dan Eropa (Adida, 2012).

Dengan adanya poin-poin dari asal-usul munculnya isu *Islamophobia* di Eropa, termasuk Prancis. Dapat dikatakan bahwasannya isu *Islamophobia* di Prancis yang ditujukan kepada para imigran Muslim yang mengalami serangan mental karena diskriminasi dari masyarakat Prancis sangat sulit diterima. Kedatangan yang tidak diterima dan diskriminasi karena perbedaan budaya serta keyakinan yang dianutnya dipersempit dengan cara dipersulit untuk berbagai bidang yang mereka tekuni.

Prancis perlu menyadari juga bahwasannya sifat sosial Prancis yang tergolong majemuk seharusnya dapat menerima dengan luas akan perbedaan yang ada. Dengan diketahuinya asal-usul isu *Islamophobia* ini muncul di tanah Eropa, termasuk Prancis seharusnya sadar jika di dunia ini banyak sekali perbedaan dari segala jenis, terutama masalah budaya, ras, dan keyakinan. Prancis seharusnya mengerti arti dari nilai HAM, dimana setiap individu juga berhak memilih jalan hidup dan keyakinan yang individu tersebut anut. Nilai-nilai HAM tersebut tidak hanya dijunjung tinggi oleh setiap elemen masyarakatnya, melainkan juga harus didukung oleh pemerintah agar sejarah yang telah dianut lama oleh bangsa Barat dapat berubah demi kesejahteraan dan keharmonisan hidup terjaga.

BAB III

ANALISIS OKI TERHADAP KASUS ISLAMOPHOBIA DI PRANCIS PADA TAHUN 2015 MELALUI KONSEP PERAN ORGANISASI INTERNASIONAL CLIVE ARCHER

Peran Organisasi Internasional pertama kali berkembang sebagai salah satu cara guna menyelesaikan sebuah masalah atau konflik yang berafiliasi yang berpegang teguh dengan mempromosikan perdamaian dunia. Teori peran organisasi internasional ini memiliki pandangan yang pro aktif, dimana menjadi sebuah karakter dari perilaku, tingkah laku, dan juga tingkatan objek yang dikemukakan oleh Clive Archer. Tingkatan objek tersebut meliputi instrumen, forum, dan aktor. Dari ketiga peranan yang dikemukakan oleh Clive Archer tersebut, masing-masing peranan tersebut memiliki penjelasannya. Penjelasan tersebut, yaitu:

1. Instrumen Penting

Peranan pertama yang dikemukakan oleh Clive Archer adalah instrumen, dimana peranan ini dimaksud sebagai peranan pertama yang vital. Hal ini juga merupakan kepentingan dari negara-negara di dunia untuk dapat mewujudkan kepentingan dan tujuan masing-masing. Organisasi Internasional dari teori Clive Archer ini dijadikan sebagai cara yang “selektif” demi pencapaian kebijakan luar negeri yang tepat. Proses peran suatu organisasi internasional yang menempatkan dirinya sebagai instrumen penting guna mengurangi

dari konflik yang sedang terjadi. Instrumen ini berbentuk cara atau upaya dalam melakukan perdamaian yang pasti. Tindakan yang dilakukan oleh OKI demi mengurangi kasus-kasus dari isu *Islamophobia* di Prancis dan terciptanya suasana yang kondusif adalah dengan melakukan tindakan preventif, seperti bernegosiasi dengan pemerintah Prancis serta melakukan tindakan mediasi dengan pihak-pihak yang melakukan tindakan kontroversial berkaitan dengan isu *Islamophobia* tersebut.

OKI menggandeng 2 organisasi besar, seperti PBB dan juga Uni Eropa. Namun, di bagian teori yang dikemukakan oleh Clive Archer, OKI lebih memilih bekerjasama dengan PBB terlebih dahulu, karena mengingat ini merupakan masalah HAM dari hak individu dalam beragama. Setahun pasca terjadinya teror yang menyerang Kantor Majalah Satir Charlie Hebdo di Paris, Prancis. OKI telah melakukan pertemuan yang diwakilkan oleh Sekjen Politik OKI yang bernama Hameed Opeloyeru dengan PBB pada tanggal 17 November 2016 di Jenewa, Swiss. Adapun hasil dari pertemuan tersebut meliputi:

- Menggunakan serta memanfaatkan hasil dari deklarasi HAM Jenewa dan PBB.
- Menggunakan hasil dari perjanjian PBB yang berkaitan dengan perdamaian dan kebebasan individu dalam beragama,

berekspresi, larangan SARA, dan lain-lain sebagainya (Abidjan, 2016).

2. Forum

Peranan diurutan kedua yang dikemukakan oleh Clive Archer ini adalah forum, wadah ataupun arena. Dimana peranan ini memiliki maksud sebagai organisasi internasional yang bergerak menjadi penengah dari adanya konflik, menempatkan dirinya sebagai “wadah” mediasi bagi pihak-pihak yang sedang berkonflik. Kebijakan yang diwujudkan adalah sebagai tempat berinteraksi untuk mewujudkan tujuan masing-masing secara bersamaan. Dalam hal tersebut, negara-negara yang ikut Organisasi Internasional ini dapat berdebat, berdiskusi, bekerjasama, dan bahkan menentang atas pembahasan atau usulan yang tidak dapat disetujui. Tingkatan kedua ini melakukan pendekatan pastinya dengan cara mediasi, inisiatif, diplomasi, dan negosiasi yang mengutamakan di level elit. Pada pengaplikasian teori peranan organisasi internasional Clive Archer, forum ini berguna untuk menganalisis permasalahan dari panasnya isu *Islamophobia* di Prancis. OKI mengambil tindakan besar yang cepat dan responsif untuk menyelesaikan isu *Islamophobia* mulai dari meminta semua anggotanya dan juga masyarakat Muslim dunia untuk mendesak pemerintah Prancis yang berbuat keji terhadap kaum Muslim imigran

Prancis. Tidak hanya pemerintahnya saja yang didesak, melainkan termasuk para fanatisme dari kalangan masyarakat sipil Prancis asli untuk bersikap adil serta “memanusiakan” manusia. Selain hal tersebut, OKI juga mengirimkan beberapa delegasi resminya dari internal mereka untuk terbang menuju Paris, Prancis guna berdiskusi langsung dengan para pejabat tinggi Prancis, PBB, dan para petinggi anggota Uni Eropa. Pada saat pertemuan antara OKI dengan kaum-kaum elit Prancis dan Eropa, OKI menjelaskan maksudnya dengan memberikan rincian dari rentetan isu-isu *Islamophobia* di Prancis (Agriesta, 2015).

OKI juga sebagai organisasi fasilitator yang berperan penting dengan memberikan bantuan kemanusiaan, seperti alat-alat kesehatan untuk para korban teror dan yang terdampak dari perlakuan diskriminasi agama oleh kaum elit serta fanatisme Prancis (VOA, voaindonesia.com, 2015). OKI yang berperan sebagai fasilitator tersebut tentunya juga bekerjasama dengan para delegasinya beserta Presiden Bulan Sabit Merah Qatar dan Yayasan Amal Internasional.

3. Aktor

Peranan vital terakhir ini yang dikemukakan oleh Clive Archer ini adalah sebagai aktor, dimana aktor ini merupakan pihak-pihak dari organisasi internasional yang berinisiatif melakukan mediasi dengan

tujuan untuk melakukan pembangunan sebuah perdamaian dari pihak-pihak yang bertikai. Peranan ini juga bertujuan untuk memperbaiki sebuah aspek kehidupan seperti sosial dan budaya agar tercapainya sikap perdamaian dunia yang abadi. Peran organisasi internasional ini bersifat bebas dan independen, dimana ketika organisasi internasional ini telah memutuskan suatu keputusan, apa yang telah diputuskan tidak dapat diganggu gugat atau telah mutlak. Organisasi internasional ini juga dapat terlibat dengan forum internasional lainnya. Peran bagus dari organisasi internasional ini dapat dilihat dengan rekomendasi, resolusi solusinya, dan perintah yang telah dikeluarkan. Pengaplikasian teori Clive Archer untuk menganalisis masalah isu *Islamophobia* di Prancis, OKI didukung oleh Komite Menentang *Islamophobia* Prancis yang setuju untuk mendukung keputusan yang telah dibuat secara mutlak oleh Parlemen Eropa yang bekerjasama dengan OKI, guna mencabut kekebalan hukum dari pemimpin partai radikal Prancis, Partai Sayap Kanan, yaitu Marine Le Pen (Heneghan, 2013). OKI tentunya juga membentuk IPHRC atau sebuah badan ahli HAM yang berdiri dengan sah dan *independent* dengan berfokus pada kejahatan HAM Muslim dunia. Oleh karena hal tersebut, OKI membentuk IPHRC di Prancis karena memiliki isu *Islamophobia* yang cukup besar di tanah Eropa, khususnya di Eropa Barat (OIC,

Countering Islamophobia: OIC Independent Permanent Human Rights Commission, 2008).

3.1. Kiprah OKI dalam dunia Internasional

OKI berdiri di Rabat, Maroko pada 25 September 1969. OKI dibentuk setelah adanya pertemuan pemimpin dari negara-negara Islam di dunia dan telah menyepakati Deklarasi Rabat yang telah menegaskan kedudukan dari keyakinan agama Islam itu sendiri, penghormatan pada Piagam PBB, dan juga HAM. OKI merupakan organisasi multilateral dimana banyak anggota yang berpartisipasi. OKI sendiri didirikan karena adanya rasa keprihatinan atas nasib kaum Muslim di dunia, pasca peristiwa penindasan dari kaum Zionis Israel di tanah Palestina, termasuk pembakaran Masjid Al-Aqsa pada saat 21 Agustus 1969. Didirikannya OKI selain adanya rasa keprihatinan atas nasib kaum Muslim di dunia, OKI juga memiliki tujuan untuk menciptakan rasa solidaritas negara-negara Islam, mengadakan kerjasama di anggotanya serta negara-negara Islam lainnya, mendukung perdamaian dunia, melindungi tempat-tempat suci agama Islam, dan membantu masalah-masalah atau konflik negara Islam termasuk memerdekakan tanah Palestina atas Israel. OKI sendiri untuk saat ini memiliki total 57 anggota yang mayoritas anggota-anggotanya berasal dari tanah Asia dan Afrika (KEMLU, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), 2014).

Pada awalnya Organisasi Kerjasama Islam (OKI) ini hanya fokus ke dalam masalah yang sedang dihadapi oleh Palestina, namun OKI melebarkan sayapnya untuk mensejahterakan kaum Muslim di seluruh dunia. OKI sendiri selain fokus ke dalam masalah-masalah Muslim dunia, OKI juga menjalankan berbagai kerjasama antar negara khususnya negara Muslim. Kerjasama yang dijalankan OKI meliputi berbagai aspek, seperti politik, sosial, IPTEK, ekonomi, perdagangan, dan lain sebagainya. OKI juga selalu mengadakan pertemuan mendesak antar anggota-anggotanya guna solusi menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. Pertemuan-pertemuan tersebut adalah KTT yang mengkaji semua masalah termasuk kinerja OKI itu sendiri. Awal perubahan OKI menjalankan yang Namanya *OIC 10th Years Program of Actions*. Program tersebut memfokuskan tidak hanya dari segi masalah politik saja, melainkan sudah ke masalah perdagangan ekonomi antar negara.

OKI di masa kini hingga ke depannya, OKI juga memfokuskan diri untuk mengkaji masalah-masalah diskriminasi keagamaan dan juga Hak Asasi Manusia (HAM). Bila memang masalah tertentu yang menyangkut pelanggaran HAM, maka OKI siap untuk bekerjasama dengan organisasi-organisasi dunia lainnya guna menyelesaikan masalah yang ada. Berkaitan dengan kasus yang menyangkut *Islamophobia* di dunia Barat, OKI beserta negara-negara Muslim yang juga merupakan anggotanya siap mengundang delegasi-delegasi dari negara-negara Eropa untuk melakukan *interfaith dialogue*. Dengan adanya dialog antar keyakinan tersebut dapat mengurangi

bahkan harapannya menghilangkan pemahaman yang keliru atas penilaian buruk dari masyarakat-masyarakat Eropa. Dengan adanya *OIC Strategy Paper on Combating Defamation of Religion*, maka OKI perlu menjaga solidaritas dan kesatuan dari para anggota OKI terhadap masalah-masalah yang menyangkut keagamaan melalui proses *engagement* kepada individu atau kelompok lain (KEMLU, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), 2014).

OKI selama ini telah banyak berkontribusi demi tercapainya kedamaian dunia yang hakiki. Sebagai organisasi internasional atau Organisasi Kerjasama Antar Pemerintah (IGO) yang berawal terhadap masalah-masalah kemerdekaan Muslim Palestina. OKI selalu memberikan dukungan penuh terhadap proses terjadinya kemerdekaan Palestina dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya. Dukungan yang diberikan oleh OKI terhadap Palestina berupa diplomasi-diplomasi. Selain dukungan demi terciptanya kemerdekaan Palestina, OKI juga berusaha bertarung melawan tindakan terorisme yang menyerang dunia. OKI selama ini juga terus mengembangkan resolusi-resolusi konkrit dan vital demi mengurangi masalah-masalah yang menyangkut Muslim dunia. OKI secara terus-menerus melakukan penyeruan guna menarik semua tantara Israel yang berada di tanah Palestina, OKI juga membuat *Palestine Liberation Operation* (PLO) sebagai perwakilan yang menyatakan Palestina telah merdeka secara sah. OKI juga aktif dalam melakukan perubahan dunia demi tercapainya dunia yang baik, seperti salah satunya OKI dengan Komite Perdamaian Islam yang notabene didirikan pada

tahun 1981, dimana berguna dalam menyelesaikan konflik Israel dan negara-negara Arab.

Selain masalah yang menyangkut di wilayah-wilayah Arab, OKI juga berkontribusi besar dalam mengatur gerakan-gerakan oposisi internasional yang mana hal tersebut merupakan serbuan Soviet ke wilayah Afghanistan. Hal-hal tersebut merupakan kontribusi OKI dalam menangani konflik yang terjadi. Selain menyelesaikan konflik, OKI juga berkontribusi di bidang sosial-budaya, dimana OKI mendukung pendidikan yang merata bagi penduduk Muslim di seluruh dunia. OKI mendirikan beberapa perguruan tinggi Islam melalui sumbangan dana solidaritas negara-negara Muslim. Universitas Islam tersebut berada di Malaysia (Asia Tenggara), Nigeria, Uganda (Afrika), dan Bangladesh (Asia Selatan). Selain hal tersebut, OKI juga selalu dengan aktif mendukung kaum Muslim minoritas yang berada di dunia seperti di wilayah Asia dan juga Eropa (Fathoni, 2017).

OKI melakukan pendekatan yang signifikan dan dinilai sangat efektif, dimana mengundang banyak petinggi dari Uni Eropa serta beberapa perwakilan dari PBB. Eksistensi OKI di Prancis yang merupakan salah satu negara Eropa Barat, dimana banyak menyumbang kasus *Islamophobia*. OKI melakukan hubungan-hubungan diplomasi yang aktif, melakukan banyak pendekatan juga guna menyelesaikan kasus *Islamophobia*, seperti mediasi, fasilitator, dan inisiator. Semenjak terdapat kasus serangan teror pada tahun

2015 lalu di kantor majalah satir Charlie Hebdo, OKI menjadi lebih fokus menangani Muslim minoritas di Eropa, khususnya di Prancis (Agriesta, 2015).

Teori peran organisasi internasional ini juga menjelaskan bahwasannya dengan adanya sebuah permasalahan, tidak perlu untuk berkonflik dengan kekerasan terus-menerus. Oleh karena itu teori ini datang untuk membantu setiap pihak yang bertikai untuk mencapai kesepakatan damai. Clive Archer juga menjelaskan dengan adanya pihak-pihak yang bertikai dapat diselesaikan dengan cara peran organisasi internasional yang turun tangan membantu. Maka kedamaian akan menyertai pihak-pihak tersebut. Clive Archer juga menjelaskan bila mana pihak yang ingin diselesaikan dengan cara yang baik-baik, maka peran organisasi internasional juga akan membantu dengan cara berdiplomasi yang baik, mediasi, dan lain sebagainya (Ivy, 2006).

Dalam upayanya, teori peran organisasi internasional bisa dikatakan sebagai kumpulan-kumpulan dari berbagai usaha dan solusi yang dilakukan oleh masing-masing organisasi internasional dalam rangka mencapai tujuannya, termasuk ketika menjadi pihak ketiga dalam menangani negara yang bertikai. Clive Archer sendiri mengatakan bahwasannya, tujuan suatu organisasi internasional adalah nilai akhir yang telah menjadi ketetapan Bersama-sama. Peran organisasi internasional bisa dikatakan sebagai konsep atau teori dari pandangan liberalisme. Hal tersebut dikatakan oleh tokoh hubungan internasional Evan dan Newham. Evan dan Newham

mengatakan bahwasannya organisasi internasional merupakan sebuah badan formal pemerintah atau non-pemerintah yang didirikan oleh perjanjian yang telah disepakati Bersama, baik secara bilateral ataupun multilateral (Archer, International Organizations, 2003).

Prancis merupakan negara di Eropa Barat yang memiliki masyarakat beragama Muslim terbesar kedua di dunia. Para masyarakat Muslim Prancis tersebut mayoritas merupakan imigran yang datang dari Afrika Utara dan beberapa dari Timur Tengah atau Arab Saudi. Mereka datang dengan berbagai tujuan, karena ada yang mencari suaka dan bahkan hanya ingin memperbaiki kelangsungan hidup. Namun, dengan banyaknya imigran Muslim yang datang ke Prancis membuat petinggi-petinggi garis keras Prancis takut atau khawatir dan menutup jalur imigran serta melarang apapun itu bagi warga-warganya yang beragama Muslim. Dari kasus tersebutlah timbul yang namanya gerakan *Islamophobia* dan ditambah dari kasus teror meyeramkan yang terjadi di kantor majalah satir Charlie Hebdo di Paris, Prancis pada tahun 2015 (Castle, 2008). Oleh sebab itu di dalam kasus permasalahan ini, yang menjadi aktor pentingnya adalah OKI. OKI menjadi aktor penting karena OKI terjun langsung sebagai instrumen penting, wadah mediasi, dan juga aktor yang melakukan mediasi atau solusi-solusi lainnya, demi terciptanya kehidupan yang sejahtera dan adil bagi warga Muslim Prancis dengan pihak-pihak Prancis lainnya, seperti pemerintah dan masyarakat aslinya.

3.2. Kasus Besar Islamophobia di Prancis dan Kasus di Tahun 2015

Agama Muslim di Prancis merupakan agama terbesar kedua di Prancis dan di daerah Eropa Barat. Para warga Muslim Prancis tersebut merupakan orang-orang imigran yang berasal dari beberapa negara di Afrika Utara dan Timur Tengah. Tujuan dari para imigran Muslim tersebut beraneka ragam, mulai dari mencari suaka karena negara asalnya sedang terjadi peperangan, bahkan hanya sekedar bertaruh demi kesejahteraan hidup yang lebih baik. Imigran-imigran Muslim yang datang ke Prancis tersebut membuat suatu organisasi yang sangat kuat dan cepat dalam berkembang, sehingga hal itulah yang menjadi dasar pemerintah Prancis berencana menutup seluruh kesempatan khusus imigran Muslim yang ingin datang ke Prancis. Dengan adanya imigran-imigran Muslim yang banyak di Prancis dan perkembangan organisasi Muslim di Prancis yang begitu cepat membuat petinggi atau pemerintah Prancis resah, jika muncul para golongan radikal yang mengatasnamakan golongan atau agama tertentu. Oleh sebab itulah kasus *Islamophobia* yang ada di Prancis memang sangat besar dan menimbulkan golongan anti-Muslim yang besar juga (Republika, 2019).

Peristiwa penyerangan atau teror yang terjadi pada awal bulan Januari 2015 di kantor pusat majalah satir Charlie Hebdo, dimana penyerangan tersebut dilakukan oleh kelompok-kelompok radikal yang mengatasnamakan agama sebagai dasar penyerangannya. Kelompok radikal tersebut menyerang ibu kota Prancis dan beberapa kota di Prancis karena menilai kehidupan di Prancis telah menyimpang dan

adanya tindakan kontroversi. Tindakan kontroversi tersebut menjadi sebuah momentum dalam perubahan perspektif serta sikap pemerintah Prancis dan masyarakat Prancis yang mendiskriminasi atau melecehkan umat Muslim Prancis serta umat Muslim dunia. Adanya penyerangan ini menyebabkan berkembangnya dengan cepat kasus-kasus *Islamophobia* di Prancis, dimana ada efek anti-Islam di berbagai aspek kehidupan Prancis (Vallencia, 2017).

Kasus *Islamophobia* besar lainnya di Prancis seperti stigma ganda atau serangan diskriminasi yang bertubi-tubi, dimana hal tersebut dirasakan oleh warga wanita Muslim Maghribi. Para wanita Muslim Maghribi tersebut digolongkan oleh masyarakat asli Prancis sebagai pihak yang inferior sama seperti apa yang diyakini oleh mereka. Oleh sebab itulah, para wanita Muslim Maghribi merasakan serangan diskriminasi yang bertubi-tubi (Kirsbaum, 2009). Kasus-kasus besar *Islamophobia* di Prancis menjadi besar juga ulah provokasi dari para pihak-pihak elit atau pemerintah Prancis yang mendorong warga negaranya ikut membenci masyarakat Muslim Prancis, bahkan politikus menjadikan kasus ini masuk ke dalam proyek kampanye partainya. Selain dari pihak-pihak elit di Prancis, para media di Prancis juga memperparah keadaan dari kasus yang telah lama terjadi ini (Castle, 2008).

Jumlah dari kejadian atas kasus-kasus *Islamophobia* di Prancis dari hari ke hari semakin meningkat. Bahkan pada tahun yang sama di kejadian serangan terbesar dalam sejarah Prancis tersebut naik menjadi 429 yang sebelumnya hanya di angka 133 kejadian. Hal-hal mengerikan yang sedang atau telah terjadi di Prancis ini

merupakan salah satu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang jelas (BBC, Kejahatan terhadap Muslim naik tiga kali lipat di Prancis, 2016). Selain adanya diskriminasi terhadap para wanita Muslim Maghribi, Prancis memiliki rentetan kasus *Islamophobia* yang terjadi di sepanjang tahun 2015. Rentetan kasus teror yang menyebabkan *Islamophobia* di Prancis meningkat, tajam meliputi:

1. 7-9 Januari serangan yang menyerang kantor majalah satir Charlie Hebdo. Pada serangan itu menimbulkan korban jiwa sebanyak 12 orang termasuk polisi yang sedang berjaga, luka parah sebanyak 5 orang. Pelaku meninggal dunia karena ditembak mati oleh kepolisian Prancis. Pelaku dikabarkan merupakan anggota organisasi Al-Qaeda di Yaman.
2. 3 Februari terjadi serangan penusukan yang dilakukan oleh Muslim Prancis bernama Moussa Coulibaly. Pelaku menusuk tiga tantara penjaga dari sebuah gerai di pusat komunitas Yahudi, Nice. Pelaku melakukan serangan tersebut karena sebuah bentuk kebencian terhadap Prancis, kepolisian, militer, dan masyarakat beragama Yahudi Prancis.
3. 19 April terjadi serangan yang membawa seorang mahasiswa Muslim Prancis, Sid Ahmed Ghlam karena telah membunuh seorang wanita di atas kursi mobilnya dan melakukan serangan ke gereja di pinggiran kota Paris yang telah direncanakan.
4. 26 Juni terjadi serangan berupa pembunuhan sadis yang dilakukan oleh pria Muslim Prancis, Yassin Salhi. Yassin Salhi telah melakukan tindakan

pembunuhan sadis terhadap pimpinan kantornya di sebuah kota kecil bernama Saint Quentin Fallavier dan Yassin Salhi juga telah mencoba untuk melakukan bom bunuh diri di lokasi sebelum digagalkan oleh pihak kepolisian.

5. 13 Juli terjadi serangan teroris yang mengatasnamakan jihad membela agama dan negara Muslim. Serangan yang dilakukan oleh empat orang remaja Muslim Prancis tersebut menargetkan kamp militer Prancis.
6. 21 Agustus terjadi serangan yang dikarenakan telah terkontaminasi oleh pikiran radikal, dimana seorang pelaku yang membawa senjata api dan pisau berusaha membunuh para penumpang dengan cara menembaknya. Namun usaha tersebut digagalkan oleh dua tentara Amerika Serikat dan temannya yang sedang berlibur.
7. 10-13 November terjadi serangan yang dilakukan pelaku, dimana pelaku memiliki hubungan yang erat dengan organisasi radikal, ISIS. Sang pelaku menyerang beberapa anggota militer Angkatan Laut Prancis dan berusaha mencuri beberapa bahan untuk merakit bom demi berlangsungnya serangan di Toulon, Prancis Tenggara (Huwais, 2015).

Selain serangan awal 2015 yang menyerang kantor majalah satir Charlie Hebdo, Paris hingga serangan terakhir yang didapatkan oleh Prancis di sepanjang tahun 2015, tepatnya di kamp militer Angkatan Laut Prancis. Dimana pada tanggal 13 November 2015 tersebut, merupakan serangan teror

yang paling menyeramkan di sepanjang sejarah negara Prancis. Pelaku yang bernama Salah Abdeslam menyerang di pusat kota Paris, Prancis dan menimbulkan 130 jiwa masyarakat Prancis tewas secara mengenaskan. Pelaku tersebut selain melakukan teror di Prancis, ternyata pelaku juga melakukan hal yang sama di pusat kota Brussels, Belgia (BBC, Tersangka utama serangan Paris diekstradisi ke Prancis, 2016).

3.3. Perbandingan Peranan OKI dalam menangani Isu Islamophobia di Negara Lain

Organisasi OKI sendiri selain membantu kaum Muslim di Prancis, OKI juga membantu menangani beberapa kasus diskriminasi sosial atas masalah keyakinan atau *Islamophobia* di Eropa, seperti di Swiss dan Belgia (BBC, Swiss larang minaret masjid, 2009). *Islamophobia* di Eropa memang sudah sangat tinggi, selain di Prancis terdapat beberapa negara Eropa, seperti Swiss dan Belgia. Pemerintah Swiss sendiri mendorong para warganya untuk menolak pembangunan minaret di Swiss, karena sudah banyak mushola dan total ada 4 masjid atau minaret di seluruh wilayah Swiss. Umat Muslim di Swiss terbilang banyak selain umat Nasrani, tetapi Muslim Swiss tidak terlihat seperti diacuhkan dan terkesan minoritas. Akhirnya masyarakat Swiss menyetujui pemerintah dimana menolak pembangunan minaret di wilayah

Swiss. Dengan demikian, pemerintah Swiss harus membuat undang-undang baru mengenai hal tersebut. Masyarakat dan juga pemerintah Swiss menilai, jika pembangunan minaret itu dilaksanakan maka akan menimbulkan sistem ideologi baru dan hukum yang tidak sejalan dengan Swiss.

Pemerintah Swiss memikirkan hal lain mengenai masalah ini, dimana jika adanya pelarangan pembangunan minaret tersebut, ditakutkan dapat mengakibatkan hubungan diplomatik Swiss dengan negara-negara Islam lainnya. *Amnesty International* dan juga warga Muslim Swiss yang bernama Elham Manea mengatakan bahwasannya dengan adanya pelarangan pembangunan minaret tersebut dapat dinilai sebagai bentuk diskriminasi agama serta Swiss melanggar perjanjian dunia, dimana telah melanggar suatu kewajiban demi terjaganya kebebasan beragama di Swiss (BBC, Swiss larang minaret masjid, 2009). Walaupun ada desakan dari warga Muslim Swiss, namun faktanya pemerintah Swiss tetap melarang pembangunan minaret di tanah Swiss. Dari pelarangan pembangunan minaret tersebut, Swiss mendapatkan kritik dari warga dunia terlebih dari negara-negara Muslim di dunia. Dari hasil referendum yang dicetuskan oleh Pemerintah Swiss melalui perwakilannya, yaitu Partai Rakyat Swiss, telah mengumpulkan total 57,5% mendukung atas penolakan didirikannya minaret baru. Melalui media massa Swiss yang bernama *Le Temps*, mengatakan bahwasannya alasan penolakan yang dilakukan oleh Pemerintah Swiss adalah bentuk “permusuhan” dan juga

“dendam” terhadap Muslim karena beberapa teror yang menimbulkan ketakutan yang teramat dalam bagi warga Eropa (detik, 2009).

Negara Eropa lainnya selain Prancis dan juga Swiss, terdapat negara Belgia dimana kasus *Islamophobia* di negara tersebut terbilang cukup memprihatinkan. Kasus *Islamophobia* di Belgia sendiri belum terlalu lama, karena kasus ini terjadi pada tahun 2017 lalu, dimana telah mencapai 76% dan dari persentase tersebut lebih tertuju kepada warga Muslimah Belgia. Menurut Asosiasi untuk Pencegahan *Islamophobia* di Belgia (CCIB), mengatakan bahwa kasus yang menimbulkan *Islamophobia* karena menargetkan tempat-tempat ibadah, serangan di muka umum yang menargetkan orang-orang secara acak, dan juga menyebarkan *hoax* atau menyebarkan ujaran kebencian yang menyebabkan konflik agama. Serangan atas kasus *Islamophobia* di Belgia sendiri paling besar disumbangkan dari jaringan dunia maya, dengan total 29%. Lalu lingkungan umum 17%, sekolah 16%, tempat kerja 7%, politik 7%, dan sisanya yang terjadi di wilayah-wilayah terpencil Belgia yang memang penduduknya Muslim.

Serangan teror yang terjadi di Belgia, dilihat dari masing-masing individunya memang lebih tertuju ke masyarakat Muslimah Belgia dan pelakunya adalah laki-laki warga asli Belgia. Sebelum OKI melihat ini, ternyata Uni Eropa telah merespon tindak pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di wilayahnya dan menilai tindakan tersebut merupakan sebuah

bentuk propaganda yang dilakukan oleh partai-partai sayap kanan Belgia dan para kaum *elite* Belgia (Purwanto, 2018). Belgia bisa dikatakan yang paling memprihatinkan atas kasus *Islamophobia* ini, karena terdapat juga wanita Muslim Belgia diserang hingga merobek pakaiannya. Lalu, setelah merobek pakaian wanita Muslim tersebut diserang kembali secara membabibuta, dimana meninggalkan beberapa bekas luka di tubuhnya (Mazaya, 2018). Kasus *Islamophobia* lainnya di Belgia kembali menyerang wanita Muslim Belgia, dimana kali ini wanita Muslim tersebut yang notabene masih remaja dilecehkan. Seluruh warga Muslim Belgia mengecam kasus ini dan menilai telah melanggar kebebasan beragama serta norma-norma yang sudah tertanam lama di Belgia (Islam, 2018).

Kasus-kasus *Islamophobia* di Eropa memang sangat parah dan memprihatinkan, karena memang Bangsa Barat masih takut serta masih ragu-ragu untuk hidup berdampingan dengan masyarakat Muslim. Keprihatinan yang ditunjukkan oleh Eropa dengan menutup semua akses yang ditujukan untuk para imigran Muslim yang ingin masuk ke dalam zona Eropa. Dengan naiknya secara signifikan, yaitu menjadi 300% kasus *Islamophobia* di Eropa setelah mengingat banyaknya teror-teror yang terjadi di Eropa.

3.4. Cara OKI dalam Menanggulangi Kasus Islamophobia di Eropa dan Prancis

OKI merupakan organisasi yang bersifat multilateral terbesar kedua setelah organisasi PBB. *Islamophobia* mulai datang dan menghantui masyarakat Barat sudah lama, mengingat kasus-kasus terorisme mayoritas dilakukan oleh oknum-oknum radikal yang mengatas namakan agama serta berlatar belakang agama Islam. Kehadiran isu *Islamophobia* di dunia Barat ditambah dengan adanya serangan pesawat komersial yang menghantam gedung kembar pencakar langit WTC di Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001 lalu. Dari kasus-kasus teror tersebut membuat isu *Islamophobia* di dunia Barat semakin berkembang dengan cepat. Perkembangan isu *Islamophobia* di Eropa semakin cepat ditandai dengan pelarangan hijab serta cadar bagi wanita Muslim, pelarangan menggunakan hijab bagi pelajar Muslim, menggunakan pakaian renang Muslimah, pelarangan membangun masjid, dan lain-lain sebagainya. Peralpnya, penilaian buruk terhadap citra agama Islam semakin membuat masyarakat Muslim Eropa termasuk Prancis merasa khawatir karena akan menimbulkan diskriminasi-diskriminasi sosial. Diskriminasi-diskriminasi yang ada di tanah Eropa bervariasi dan langkah-langkah jalur tengah telah diambil oleh OKI (OIC, oic-oci.org, 2012).

Selama kurang lebih 10 tahun ini, kasus terorisme menjadi kasus yang paling serius di dunia Barat karena menimbulkan ancaman dan pastinya

menimbulkan isu *Islamophobia*. Serangan baru-baru ini yang terjadi di dunia barat dan yang terjadi 6 tahun yang lalu di Prancis, yaitu menargetkan kantor majalah satir Charlie Hebdo yang terjadi di Prancis, telah membuktikan bahwasannya radikalisme yang mengatas namakan agama tersebut tidak jauh-jauh dengan kasus terorisme yang meresahkan warga dunia. Paham radikal yang terjadi di dunia Barat memang sudah menjadi karakter bagi oknum-oknum tertentu. Oleh karena itu setiap pihak harus memfokuskan diri pada kasus serius ini, mengetahui asal usulnya, dan juga mencegah kasus teror tidak terulang kembali. Kasus 6 tahun yang lalu ini yang terjadi di Prancis menjadi pembahasan yang menarik, karena peristiwa radikalisme di Prancis sangat tinggi dan melihat dari masa lalu Prancis sendiri dimana Prancis dengan Islam sangat dekat dalam berbagai bentuk seperti kolonialisme, peperangan, serta imigran gelap. Dari hal tersebut membuktikan bahwa negara Prancis menjadi negara Eropa pertama yang memiliki masyarakat berlatar belakang agama Islam.

Untuk memahami kasus radikalisme di Prancis itu sendiri yang memang sudah menjadi masalah serius, harus sadar dan perlu memfokuskan pada struktur komunitas Islam di Prancis serta berbagai reaksi yang ditujukan kepada seluruh masyarakat dan pemerintah Prancis. Penting untuk memahami serta menganalisa proses terjadinya radikalisme atas keyakinan tertentu yang memang telah menjadi ancaman bagi keamanan nasional suatu negara. OKI melakukan aksinya untuk membantu keadilan bagi kaum Muslim di Prancis dengan meminta bantuan

kepada PBB dan juga Uni Eropa demi tercapainya keberhasilan memberikan keadilan kepada kaum Muslim di Prancis (Bigot, 2013). *Islamophobia* merupakan suatu pandangan sempit dari penilaian-penilaian buruk masyarakat fanatik yang menilai keyakinan mereka yang paling tepat atau tinggi, karena merupakan suatu ajaran turun-temurun. *Islamophobia* juga merupakan jenis stratifikasi agama karena menurut *European Monitoring Centre on Xenophobia and Racism* mengatakan bahwasannya isu *Islamophobia* ada di Eropa karena berdasarkan pengalaman buruk yang pernah terjadi sebelum-sebelumnya, sehingga masyarakat Eropa melakukan diskriminasi terhadap suatu golongan tertentu yang dimana golongan tersebut adalah agama Islam (EUMC, 2005).

Isu *Islamophobia* yang berakibat menimbulkan rasisme dan diskriminasi di Eropa datang dari pernyataan-pernyataan buruk dari politisi-politisi sayap kanan yang ekstrim. Adanya hal tersebut membuat keputusan atau kebijakan-kebijakan nasional di tanah Eropa khususnya Prancis mengesampingkan Muslim bahkan mengabaikan dan menjadi makanan sehari-hari mereka dalam melancarkan sistem perpolitikan suatu negara. Isu *Islamophobia* di Eropa semakin hari semakin meningkat, mengingat daratan Eropa yang mengagungkan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi seluruh masyarakatnya serta masyarakat dunia tidak sejalan dengan apa yang sedang terjadi di dalam negaranya (*Islamophobia*). Dengan adanya diskriminasi dan ketidakadilan dalam hak memilih keyakinan di Eropa, menjadikan hal ini irasional (Convention, 2000). *Islamophobia* sendiri di

Eropa merupakan suatu paradoks yang tidak selaras dengan apa yang diagungkan oleh bangsa Eropa. Paradoks atau isu-isu inilah yang menjadikan ketidak selarasan bangsa-bangsa Eropa dengan Islam. Ketidak selarasan atau irasional ini tergambar dengan adanya indikator ketidakadilan dalam memilih agama Islam sebagai pilihan keyakinan. Sebagai contoh ketika Nicolas Sarkozy yang sebagai mantan Presiden Prancis pada saat itu mengatakan bahwa Prancis tidak menerima *Islamophobia* (Salam, 2012).

Sebelum masuk ke dalam peranan penting OKI dalam menanggulangi isu *Islamophobia*. Penjelasan singkat mengenai PBB, karen PBB sendiri didirikan di San Francisco, Amerika Serikat pada tanggal 24 Oktober 1945 pasca Perang Dunia 2. Tanggal berdirinya PBB berbeda dengan tanggal Sidang Majelis Umum, karena tanggal Sidang Majelis Umum tersebut sendiri dimulai di Church House, London, Inggris pada tanggal 10 Januari 1946 (KEMLU, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), 2019).

OKI merupakan suatu organisasi yang bertindak secara moderat atau organisasi yang jika menyelesaikan masalah dengan cara mengambil jalan tengah. Termasuk kasus-kasus yang saat ini menjadi fokus utama dari OKI sendiri seperti isu *Islamophobia*. OKI melakukan berbagai cara demi menyempurnakan citra Islam di mata dunia terlebih dunia Barat atau Eropa dengan cara yang sangat diplomatis. Upaya-upaya atau cara yang dilakukan oleh OKI dalam menanggulangi isu *Islamophobia* di Prancis selain melakukan beberapa hal

seperti peran inisiator, mediator, dan fasilitator seperti yang telah dibahas di atas. OKI juga pastinya melakukan riset atau penelitian langsung ke lokasi terjadinya kasus *Islamophobia*. Riset yang dilakukan oleh OKI ini dengan mengumpulkan fakta-fakta yang terjadi secara akurat, agar OKI dengan mudah menyelesaikan masalah *Islamophobia*. OKI ingin melakukan hal seperti itu karena OKI sendiri organisasi Islam, ingin mengembalikan citra positif Islam di mata dunia, dan isu *Islamophobia* sendiri merupakan kasus terbesar yang harus OKI selesaikan.

OKI melakukan peran-peran yang sangat diplomatis dengan cara inisiator, mediator, dan juga fasilitator. Selain hal-hal tersebut, OKI melakukan kerjasama dengan PBB dan Uni Eropa guna memberantas diskriminasi dalam hak beragama serta tidak adanya toleransi antar umat beragama. OKI di sini membantu masyarakat Muslim di Eropa tidak sendiri, melainkan dibantu oleh PBB dan Uni Eropa juga. OKI tidak mampu untuk melancarkan misinya sendiri karena faktanya masyarakat Muslim di dunia semakin bertambah dan tidak mungkin bisa melindungi secara mutlak yang bukan dari anggota OKI itu sendiri. OKI meminta bantuan PBB karena OKI menilai bahwasannya PBB merupakan suatu organisasi mutlak yang dapat berperan sebagai badan yang menaruh aspirasi atau bentuk permasalahan yang terjadi di wilayah-wilayah tertentu.

Isu *Islamophobia* sudah menghantui masyarakat dunia terlebih barat atau Eropa. PBB selaku organisasi terbesar di dunia pasti akan mampu memainkan peran besar Bersama OKI dalam menciptakan keharmonisan dalam hidup di

dunia. Mengingat masalah-masalah yang terjadi sekarang ini tidak selalu berkaitan dengan perang atau ekonomi semata. Isu *Islamophobia* ini juga merupakan bentuk ancaman yang terjadi di dunia sejak 1 dekade silam. OKI menilai selama masih ada isu *Islamophobia* di dunia, maka dunia tidak akan hidup harmonis. Atas hal tersebut membuat OKI dan PBB beserta Uni Eropa serius untuk mengatasi isu *Islamophobia* ini. Upaya-upaya diplomatis yang dilakukan oleh OKI selain melakukan tindakan inisiator, mediator, fasilitator, dan juga melakukan kerjasama dengan PBB serta Uni Eropa, yaitu:

A. Forum Nur-Sultan

Forum Nur-Sultan merupakan sebuah forum atau pertemuan yang dilaksanakan oleh OKI untuk mempertemukan semua anggota OKI dengan para petinggi parlemen Eropa, yang dilaksanakan di Nur-Sultan (Astana) selaku ibu kota negara Kazakstan. Sebelum isu *Islamophobia* semakin memanas di Prancis setelah adanya serangan teror Charlie Hebdo. OKI sudah melakukan forum untuk membahas isu tersebut terlebih dahulu, dimana memang Eropa sudah menilai negatif terhadap agama Islam. Forum ini dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2008. OKI menyampaikan bahwa pihak-pihaknya sangat menghargai perbedaan dari sesama makhluk beragama. Adanya perbedaan dari Islam dengan Bangsa Barat, maka memang harus hidup rukun dan saling menghargai.

B. *Interfaith Dialogue*

OKI selain melakukan forum besar yang dinamakan Forum Nur-Sultan. OKI juga melakukan program *Interfaith Dialogue* dimana ini merupakan diskusi atau dialog antar umat beragama, yang mempertemukan OKI sendiri dengan Bangsa Eropa. Dari hasil diskusi ini terciptalah cara untuk mengurangi masalah ini, dimana memang harus hidup saling menghormati antar umat beragama.

C. Forum dengan Presiden Parlemen Uni Eropa di Arab Saudi

Presiden Parlemen Uni Eropa, Martin Schulz bertolak ke Riyadh, Arab Saudi guna memenuhi undangan OKI untuk membahas isu *Islamophobia*, dimana lebih mengerucutkan pembahasannya, yaitu pertukaran pandangan mengenai hidup perbedaan antar keyakinan. Dengan begitu Uni Eropa lebih paham Islam dan diharapkan tidak terulang kembali (Koswaraputra, 2016). Dengan begitu diharapkan kasus *Islamophobia* di tanah Eropa, terutama Prancis dapat berkurang dan tidak akan terulang kembali.

3.5. Kerjasama OKI dengan PBB dan Uni Eropa

Atas kejadian serangan teror yang terjadi di Prancis bisa dikatakan bahwasannya telah muncul golongan yang menamakan diri mereka sebagai “Anti-Muslim” dan mereka memiliki tujuan untuk menghasut serta

melakukan diskriminasi besar-besaran. Islam di Prancis dinilai sebagai agama yang digunakan untuk makanan sehari-hari sistem perpolitikan Prancis kepada publik. Sistem perpolitikan Prancis yang cukup kuat dan dengan adanya dukungan media-media yang mendukung peranan pemerintah tersebut, munculah penilaian sepihak yang dilakukan oleh masyarakat Prancis terhadap agama Islam yang dinilai sebagai masalah besar yang berada di lingkungan masyarakat Prancis. Masalah-masalah keyakinan yang terjadi Prancis merupakan masalah besar yang harus diselesaikan oleh Prancis sendiri. Namun, faktanya Pemerintah Prancis semakin menjadi-jadi untuk melakukan tindakan sewenang-wenangnya kepada masyarakat Muslim Prancis. Menurut Komite Menentang Islamophobia Prancis, mengatakannya bahwasannya penilaian semakin buruk tersebut juga didukung ketika para media Prancis membuat judul yang tidak sesuai dengan faktanya, seperti Islam menjadi berita utama di Prancis. Contohnya pada tahun lalu ketika saat warga Muslim Prancis garis keras membunuh 7 orang, dan seorang politisi Prancis yang menilai seorang anak kecil berumur 7 tahun telah mencuri bekal temannya di kelas.

Komite Menentang Islamophobia Prancis juga menambahkan bahwasannya telah setuju untuk mendukung keputusan yang telah dibuat oleh Parlemen Eropa guna mencabut kekebalan hukum pemimpin Partai Sayap Kanan Prancis, Marine Le Pen, sehingga Marine Le Pen dapat dipidanakan

atas kasus *Islamophobia* tersebut. Marine Le Pen sendiri sebelumnya mengatakan bahwasannya masyarakat Muslim Prancis yang sedang berdoa di sekitaran jalanan Prancis seperti NAZI ketika Jerman menduduki Prancis (Heneghan, 2013). Melalui data tersebut bahwasannya tindakan Anti-Muslim Prancis telah meningkat yang sebelumnya pada tahun antara 2010-2011 adalah 188 serta 298 menjadi 469 di tahun 2013 yang pastinya hingga saat ini telah naik kembali. Kenaikan yang signifikan tersebut membuat kenaikan juga untuk kelompok Anti-Semit dan rasisme di Prancis. Dengan penilaian sebagai agama minoritas di Prancis, Sammy Debah selaku Presiden Komite Menentang *Islamophobia* Prancis mengatakan bahwasannya Pemimpin Partai Sayap Kanan, Marine Le Pen dan beberapa politikus Prancis yang terlibat di dalamnya, membuat retorika Anti-Muslim di Prancis menjadi “makanan sehari-hari” politik mereka. Dengan adanya retorika buruk tersebut membuat 7 juta masyarakat Muslim di Prancis menjadi makin minoritas serta kurang terwakili oleh sistem perpolitikan dan bisnis di Prancis (Heneghan, 2013).

Ada hubungan yang terjadi atas kasus-kasus kekerasan atau teror, dimana di sini merupakan isu *Islamophobia* dengan perpolitikan yang ada di Prancis. Laporan yang disampaikan oleh Presiden Komite Menentang *Islamophobia* Prancis, bahwasannya tindakan *Islamophobia* dan Anti-Muslim semakin besar dan lebih menargetkan wanita Muslim Prancis daripada masjid ataupun bangunan-bangunan Muslim lainnya. Pada tahun 2012 serangan teror

di Prancis yang menargetkan wanita dan juga masjid menjadi masing-masing 40 kasus daripada kasus-kasus di tahun sebelumnya. Tindakan diskriminasi di Prancis yang tidak bersikap adil bagi wanita, seperti institusi atau birokrat melakukan tindakan sekuler yang berlebihan untuk secara sah menolak melayani wanita Muslim Prancis, padahal hal tersebut merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Tindakan yang lebih parah lagi adalah hukum di Prancis hingga saat ini masih melarang wanita Muslim dan juga pelajar Muslim untuk menggunakan jilbab dan juga cadar. Wanita Muslim yang akan melaksanakan pernikahan menggunakan pakaian yang tertutup juga dilarang. Jika, hal tersebut ditemui oleh para pejabat sipil yang ada di Prancis maka mereka akan menolak (Heneghan, 2013).

3.6. Peranan OKI dalam Menangani Isu Islamophobia di Prancis

Peranan OKI dalam Menangani Isu *Islamophobia* di Prancis sebagai inisiator, sebagai mediator, dan juga sebagai fasilitator demi terselesaikannya atau mengurangi isu *Islamophobia* di Prancis (Reuters, 2013). Adapun penjabaran dari peranan-peranan OKI dalam menangani isu *Islamophobia* di Prancis, yaitu:

A. OKI sebagai Inisiator

Adanya isu *Islamophobia* di Prancis, OKI sendiri berperan sebagai inisiator. Ketika OKI telah mendapatkan laporan bahwasanya

terdapat diskriminasi dan aturan yang merugikan bagi kaum Muslim di Prancis, OKI langsung ambil tindakan gerak cepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. OKI meminta semua anggotanya dan juga masyarakat internasional untuk mendesak pemerintah Prancis bersikap adil terhadap kaum Muslim Prancis. OKI melakukan hal seperti ini juga demi kesejahteraan kaum Muslim Prancis dan agar tidak terjadinya hal-hal yang mengganggu hubungan antara OKI dan juga Uni Eropa terlebih Prancis.

B. OKI sebagai Mediator

Adanya isu *Islamophobia* di Prancis, OKI sendiri selain berperan sebagai inisiator, OKI juga berperan sebagai mediator. Tepatnya pada tanggal 7 Januari 2015, dimana terjadinya serangan teror di kantor majalah satir Charlie Hebdo, pemimpin OKI langsung mengatakan belasungkawa atas banyaknya korban yang berjatuhan dan mengenai serangan serta isu *islamophobia*, OKI siap akan membantu memulihkan nama baik warga Muslim Prancis yang sudah tercemar dengan ditambah serangan teror yang mengatasnamakan Muslim tersebut. Lalu, tidak lama setelah serangan teror tersebut, OKI langsung mengirimkan beberapa delegasinya untuk bertolak ke Paris, Prancis guna mengecek dan membantu warga imigran Muslim di

Prancis. Tepat di hari setelahnya, yaitu di tanggal 10 Januari 2015, Iyad bin Amin Madani selaku Sekjen OKI pada saat itu langsung mengajak beberapa delegasinya untuk bertolak kembali ke Prancis untuk bertemu dan berdiskusi dengan beberapa pejabat Prancis, PBB, dan petinggi-petinggi negara Uni Eropa. OKI juga memberikan kesempatan dan siap menunggu untuk menjelaskan hingga detail kasus-kasus *Islamophobia* ini.

Delegasi OKI tersebut selain bertemu dengan beberapa pejabat Prancis, PBB, dan petinggi-petinggi Uni Eropa, mereka juga bertemu dengan beberapa tokoh dan masyarakat Muslim di Prancis untuk membantu meringankan masalah diskriminasi sosial serta keyakinan tersebut agar masyarakat Muslim di Prancis merasa adil (Agriesta, 2015).

C. OKI sebagai Fasilitator

OKI di sini selain mengambil peranan penting seperti inisiator dan mediator, OKI juga mengambil peranan penting sebagai fasilitator, dimana OKI siap memberikan fasilitas bantuan terhadap korban serangan Charlie Hebdo dan para kaum Muslim Prancis yang terkena imbas diskriminasi ini oleh kaum-kaum fanatisme Prancis.

OKI mengajak kembali para delegasinya beserta Presiden Bulan Sabit Merah Qatar pada saat itu, dan Yayasan Amal Internasional. OKI langsung bertemu dengan beberapa pejabat politik Prancis dan membahas bantuan yang akan diberikan OKI kepada mereka. Akhirnya Pemerintah Prancis setuju untuk menerima bantuan OKI. OKI memberikan beberapa alat kesehatan untuk para korban teror Prancis dan beberapa dokter kejiwaan untuk memulihkan korban yang terkena dampak diskriminasi parah oleh para kaum fanatisme Prancis (VOA, voaindonesia.com, 2015).

D. IPHRC (Independent Permanent Human Right Commission)

OKI juga membentuk sebuah badan ahli yang berdiri secara sah dan mandiri yang berfokus pada kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM), namun lebih ke kejahatan HAM Muslim. IPHRC sendiri dibentuk pada tahun 2008, dimana dibentuk jauh sebelum teror terjadi di Prancis. Oleh karena hal tersebut OKI membentuk IPHRC juga di Prancis (OIC, Countering Islamophobia: OIC Independent Permanent Human Rights Commission, 2008).

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Prancis memang merupakan negara maju di wilayah Eropa Barat yang memiliki masyarakat beragama Muslim dan Muslim Prancis menjadi yang terbesar kedua di Prancis. Kedatangan Muslim di Prancis disebabkan oleh adanya imigran-imigran Muslim yang datang ke Prancis demi mendapatkan kesejahteraan hidup atau memperjuangkan nasib. Dengan adanya imigran-imigran Muslim yang berdatangan ke Prancis membuat warga Muslim Prancis membentuk sebuah organisasi demi menguatkan Muslim di Prancis, hal-hal tersebut membuat pemerintah Prancis resah jika terjadi sebuah paham radikalisme dan terorisme. Akhirnya pemerintah Muslim menutup pintu bagi imigran Muslim yang ingin datang ke Prancis dan melarang warga muslim Prancis untuk mengenakan aksesoris-aksesoris yang berkaitan dengan identitas Muslim.

Hal-hal yang sebelumnya diresahkan oleh pemerintah Prancis akhirnya menjadi kenyataan menjadi kerasahan yang semakin parah dan ketakutan yang tiada henti, karena sudah terdapat kelompok-kelompok yang radikal. Pemerintah Prancis dan beberapa masyarakat yang mendukung pemerintah menilai bahwasannya telah menjadi ancaman yang serius bagi negara mereka. Adanya serangan-serangan atau tindakan terorisme yang terjadi di Prancis membuat citra Muslim yang sebelumnya

dikenal sebagai agama yang membuat damai akhirnya tercemar menjadi agama yang ditakuti dan dinilai sebagai agama yang melahirkan orang-orang radikal akibat perilaku oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Kejadian yang terjadi pada tahun 2015 lalu telah membuat sejarah bagi negara Prancis, dimana hal tersebut merupakan serangan teror terbesar dalam sepanjang tahun 2015. Saat kejadian yang terjadi di Paris dan beberapa kota di Prancis di sepanjang tahun 2015, membuat pemerintah Prancis harus menempatkan Prancis sedang mengalami situasi darurat dan menyalakan lonceng peperangan melawan terorisme. Dengan adanya serangan terorisme dari oknum-oknum radikal yang mengatas namakan agama sebagai dasar serangannya menempatkan agama Muslim, dimana hal tersebut dilakukan oleh imigran Muslim Prancis, sehingga konsekuensinya adalah mendapatkan diskriminasi sosial yang menilai masyarakat Muslim Prancis merupakan ancaman serius dan sangat berbahaya bagi kedaulatan negara Prancis maupun dunia. Tragedi yang terjadi di Prancis ini menimbulkan *Islamophobia*, dimana ini merupakan tindakan permusuhan atas apa yang telah terjadi dan telah dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang berkaitan dengan Muslim. Sebenarnya situasi yang terjadi saat ini bukanlah permusuhan bagi agama atau keyakinan, tetapi melainkan permusuhan oleh dunia yang ditujukan untuk umat Muslim yang telah menyimpang dari ajaran asli agama Islam.

Oleh karena hal tersebut membuat OKI merasa prihatin atas apa yang telah dilalui dan dihadapi oleh masyarakat Muslim Prancis. OKI menilai ada pelanggaran

Hak Asasi Manusia (HAM), dimana adanya diskriminasi sosial karena apa yang mereka yakini. Atas apa yang sedang terjadi di Prancis, membuat OKI merasa hal ini tidak dapat dijamin sendiri, sehingga OKI meyakini PBB dan Uni Eropa untuk membantunya mengatasi kasus *Islamophobia* yang terjadi di Prancis dengan cara-cara yang ampuh dan diplomasi yang baik.

4.2. REKOMENDASI

Dari hasil analisis skripsi penulis ini memang tidak luput dari kekurangan. Pertama, penulis merekomendasikan peneliti lain untuk meneliti kasus *Islamophobia* di Prancis melalui sudut pandang dari organisasi lain seperti PBB. Kedua, penulis merekomendasikan peneliti lain untuk meneliti kasus *Islamophobia* lain selain di Prancis, seperti di Belgia atau di Swiss. Dan yang ketiga, penulis merekomendasikan peneliti lain untuk meneliti terkait perubahan kehidupan Muslim Prancis pada tahun 2017.

1.9. Daftar Pustaka

References

- Agriesta, D. (2015, September 5). *medcom.id*. Retrieved from OKI akan Bawa Isu Islamophobia Perancis ke Forum PBB dan Uni Eropa : <https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/zNAjPjeb-oki-akan-bawa-isu-islamophobia-perancis-ke-forum-pbb-dan-uni-eropa>
- Agustina, V. (2019, November 22). *LSM Prancis: 80 Persen Pelaku Terorisme adalah Muslim*. Retrieved from [muslimobsession.com](https://muslimobsession.com/lsm-prancis-80-persen-korban-terorisme-adalah-muslim/): <https://muslimobsession.com/lsm-prancis-80-persen-korban-terorisme-adalah-muslim/>
- Andrian. (2019, Oktober 31). *Senat Prancis Setujui Larangan Jilbab untuk Acara Sekolah*. Retrieved from [internasional.republika.co.id](https://internasional.republika.co.id/berita/q07rcc382/senat-prancis-setujui-larangan-jilbab-untuk-acara-sekolah): <https://internasional.republika.co.id/berita/q07rcc382/senat-prancis-setujui-larangan-jilbab-untuk-acara-sekolah>
- BBC. (2009, November 29). *Swiss larang minaret masjid*. Retrieved from [bbc.com](https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2009/11/091129_minaretswitzerland): https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2009/11/091129_minaretswitzerland
- BBC. (2016, Mei 4). *Kejahatan terhadap Muslim naik tiga kali lipat di Prancis*. Retrieved from [bbc.com](https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/05/160503_dunia_prancis_islam): https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/05/160503_dunia_prancis_islam
- BBC. (2016, April 27). *Tersangka utama serangan Paris diekstradisi ke Prancis*. Retrieved from [bbc.com](https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/04/160427_dunia_belgia_salah_a_bdeslam): https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/04/160427_dunia_belgia_salah_a_bdeslam
- Bigot. (2013, Januari 13). *Islamic Radicalization in France*. Retrieved from [ict.org.il](https://www.ict.org.il/article/727/IslamicRadicalization-in-France%20p#gsc.tab=): <https://www.ict.org.il/article/727/IslamicRadicalization-in-France%20p#gsc.tab=>
- Brown, C. (2005). Understanding International Relations. In C. Brown, *Understanding International Relations* (pp. 40-43). Palgrave Publishing .
- Castle, S. (2008, Maret 15). *Islamophobia Takes a Grip Across Europe (Online)*. Retrieved from [islamophobia.org](https://www.islamophobia.org/readarticle.php?article_id=76): https://www.islamophobia.org/readarticle.php?article_id=76
- Convention, E. (2000). *Charter of Fundamental Rights of the European Union*. European Union .

- Cooperation, O. o. (n.d.). *OIC Strategy General Sends Congratulatory Message to French President-Elect Emmanuel Macron*. Retrieved from oic-oci.org: <https://www.oic-oci.org>
- detik. (2009, Desember 1). *Larang Menara Masjid, Swiss Banjir Kritikan*. Retrieved from news.detik.com: <https://news.detik.com/berita/d-1251748/larang-menara-masjid-swiss-banjir-kritikan>
- économiques, I. n. (2011, April 1). *France, Demographic Indicators*. Retrieved from insee.fr: <https://www.insee.fr/en/metadonnees/source/indicateur/p1667/description>
- EUMC. (2005). *fra.europa.eu*. Retrieved from European Monitoring Centre on Xenophobia and Racism: https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/ar-06-p1-en-final.pdf
- Fathoni, R. S. (2017, Januari 7). *Organisasi Konferensi Islam (OKI) 1971-Present*. Retrieved from wawasansejarah.com: <https://wawasansejarah.com/organisasi-konferensi-islam-oki/>
- Amrad, A. H. M. F. R. (2021). *An Analysis on The Islamophobic Acts in France Post-Arab Spring*.
- Archer, C. (2003). *International Organizations*. London: Routledge Press.
- Mede, R. (1997). *Intelligence for a Multi-Ethnic Britain*. Retrieved from runnymedetrust.com: <https://www.runnymedetrust.org/publications/islamophobia>
- Project, E. U (2010). *Islamophobic Discourse in Europe the Reasons Behind Fear*. Retrieved from inotherwords-project.eu: <https://www.inotherwords-project.eu/content/islamophobic-discourse-in-the-reasons-behind-fear>
- Fuga, A. (2010). *Multicultural in France: Evolutions and Change*. Retrieved from eurospheres.org: https://www.eurospheres.org/eurospheres_working_paper
- Adida. (2012). *Women, Muslim, Immigrants, and Economics Integrations* (pp. 20-24). Stanford University Publishing
- Hasson, P. (2016, Juli 16). *France Is An Islamophobic Nation*. Retrieved from dailycaller.com: <https://dailycaller.com/2016/07/15/france-is-an-islamophobic-nation/>
- Heneghan, T. (2013, Juli 4). *reuters.com*. Retrieved from Anti-Muslim acts rising in France, rights group says: <https://www.reuters.com/article/us-france->

islam/anti-muslim-acts-rising-in-france-rights-group-says-
idUSBRE9620Z420130703

- Huwais, M. (2015, November 14). *Rentetan Serangan di Perancis Sejak Insiden Berdarah Charlie Hebdo*. Retrieved from kompas.com: <https://internasional.kompas.com/read/2015/11/14/11330891/Rentetan.Serangan.di.Perancis.Sejak.Insiden.Berdarah.Charlie.Hebdo?page=all>
- Islam, J. (2018, Juli 7). *Remaja Muslimah Diserang Hingga Terluka dan Telanjang, Umat Islam Belgia Kecam Keras*. Retrieved from jurnalislam.com: <https://jurnalislam.com/remaja-muslimah-diserang-hingga-terluka-dan-telanjang-umat-islam-belgia-kecam-keras/>
- Ivy, J. C. (2006, November 22). *Teori Organisasi Internasional*. Retrieved from sicripps.ohio.edu: <http://www.sicripps.ohio.edu/news/cmdd/artikelefhtm>
- Jakarta, K. B. (2016, Maret 4). *Pemerintahan dan Penduduk*. Retrieved from id.ambafrance.org: <https://id.ambafrance.org/Pemerintahan-dan-Penduduk>
- KEMLU. (2014, Januari 9). *Organisasi Kerja Sama Islam (OKI)*. Retrieved from kemlu.go.id: https://kemlu.go.id/portal/id/read/129/halaman_list_lainnya/organisasi-kerja-sama-islam-oki
- KEMLU. (2019, April 8). *Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)*. Retrieved from kemlu.go.id: https://kemlu.go.id/portal/id/read/134/halaman_list_lainnya/perserikatan-bangsa-bangsa-pbb
- Khamsiani, Y. (2018). *Upaya dan Peran Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dalam menangani Isu Islamophobia di Perancis Pasca Peristiwa Besar Terorisme 13 November 2015*. Jakarta.
- Kirsbaum, T. (2009). *The Children Immigrants in France: The Emergence of a Second Generation*. Retrieved from unicef-irc.org: <http://www.unicef-irc.org/files/documents/d3278-The-children-of-immigrant.pdf>
- Koswaraputra, D. (2016, Juli 31). *Upaya Diplomasi OKI Atasi Islamophobia*. Retrieved from aa.com: <https://www.aa.com.tr/id/dunia/upaya-diplomasi-oki-atasi-islamophobia/1545558>
- Lifepal. (2019, Desember 1). *Penyelesaian Masalah dengan Pendekatan Peran Organisasi Internasional*. Retrieved from lifepal.co.id: <https://lifepal.co.id/peran-organisasi-internasional/>

- Marniati. (2017, Maret 30). *Mayoritas Masyarakat Perancis Sebut Islam Bertentangan dengan Kehidupannya*. Retrieved from [republika.co.id: https://republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/17/03/30/onlvps396-mayoritas-masyarakat-perancis-sebut-islam-bertentangan-dengan-kehidupannya](https://republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/17/03/30/onlvps396-mayoritas-masyarakat-perancis-sebut-islam-bertentangan-dengan-kehidupannya)
- Mazaya. (2018, Juli 5). *Remaja Muslimah Belgia Dirobek Bajunya dalam Serangan Islamophobia*. Retrieved from [jurnalislam.com: https://jurnalislam.com/remaja-muslimah-belgia-dirobek-bajunya-dalam-serangan-islamophobia/](https://jurnalislam.com/remaja-muslimah-belgia-dirobek-bajunya-dalam-serangan-islamophobia/)
- Nielson, C. A. (2002). *Islamophobia in the EU after 11th September 2011*. Retrieved from [fra.europa.eu: http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/199-synthesis](http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/199-synthesis)
- OIC. (2008). *Countering Islamophobia: OIC Independent Permanent Human Rights Commission*. Retrieved from [oic-oci.org: http://www.oic-oci.org/](http://www.oic-oci.org/)
- OIC. (2012, Mei 12). *oic-oci.org*. Retrieved from European Xenophobia : http://www.oic-oci.org/page_detail.asp?p_id=52
- OIC. (2015, Mei 16). Retrieved from [oic-oci.org: http://www.oic-oci.org/page_detail.asp?p_id=52](http://www.oic-oci.org/page_detail.asp?p_id=52)
- Purwanto, D. (2018, September 10). *76 Persen Serangan Islamophobia di Belgia Targetkan Muslimah*. Retrieved from [jurnalislam.com: https://jurnalislam.com/76-persen-serangan-islamophobia-di-belgia-targetkan-muslimah/](https://jurnalislam.com/76-persen-serangan-islamophobia-di-belgia-targetkan-muslimah/)
- Republika. (2019, Agustus 13). *Islam di Prancis dan Jasa Para Imigran*. Retrieved from [khazanah.republika.co.id: https://khazanah.republika.co.id/berita/pw61xt313/islam-di-prancis-dan-jasa-para-imigran](https://khazanah.republika.co.id/berita/pw61xt313/islam-di-prancis-dan-jasa-para-imigran)
- Reuters. (2013, Juni 30). *OIC Helps Islamophobia Issue in France*. Retrieved from [reuters.com: https://www.reuters.com/article/us-oic-france-idUSBRE95T07F20130630](https://www.reuters.com/article/us-oic-france-idUSBRE95T07F20130630)
- Salam. (2012, Agustus 1). *salaam.co.uk*. Retrieved from Perception of Discrimination and Islamophobia: Voices from Members of Muslim Communities in The European Union: <http://www.salaam.co.uk/maktabi/Islamophobia.html>
- Sasongko, A. (2016, Januari 25). *Peran Imigran dan Perkembangan Islam di Prancis*. Retrieved from [republika.co.id:](https://republika.co.id)

<https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-digest/16/01/25/o1idl2313-peran-imigran-dan-perkembangan-islam-di-prancis>

Tempo. (2020, Januari 28). *Islamofobia di Prancis Naik Jadi 154 Kasus*. Retrieved from dunia.tempo.co: <https://dunia.tempo.co/read/1300634/islamofobia-di-prancis-naik-jadi-154-kasus>

Vallencia, M. (2017). Perkembangan Islamophobia di Prancis . *Perkembangan Islamophobia di Prancis* , 8.

VOA. (2015, Januari 16). *voaindonesia.com*. Retrieved from OKI Menyalurkan Bantuan kepada Korban Teror Prancis: voaindonesia.com/peristiwa/zMPjpNJleb-oki-menyalurkan-bantuan-kepada-korban-teror-prancis

VOA. (2019, Februari 2). *5 Negara yang Melarang Hijab atau Niqab: Prancis Hingga Turki*. Retrieved from voaindonesia.com: <https://www.voaindonesia.com/a/negara-melarang-hijab-niqab-burka-islam-turki-prancis/4769261.html>



